

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN URUSAN LOGISTIK
DALAM BIDANG MANAJEMEN LOGISTIK PADA
BULOG SUBDIVRE VII MAKASSAR**

SAMSIDAR

Nomor Stambuk : 10561 05503 15



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN URUSAN LOGISTIK DALAM
BIDANG MANAJEMEN LOGISTIK PADA BULOG SUBDIVRE VII
MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan Diajukan Oleh

SAMSIDAR

Nomor Stambuk : 105610550315

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam Bidang Manajemen Logistik pada BULOG Subdivre VII Makassar

Nama Mahasiswa : Samsidar

Nomor Stambuk : 10561 05503 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

Pembimbing II

Dr. Muhammad Tahir, M.Si

Mengatahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara

Nasrul Haq, S.Sos. M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0048/FSP/A.4-11/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari jum'at, 30 agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ilwani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si


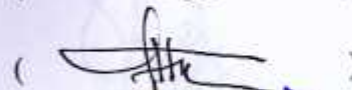

Penguji

1. Dr. Andi Rosdianti Rasak, M.Si

2. Abd Kadir Adys, SH, MM

3. Dr. Jaelan Usman, M.Si

4. Dr. Muhammad Tahir, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Samsidar

Nomor Stambuk : 10561 0550 315

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

2019

Makassar, 30 Agustus

Yang Menyatakan,



Samsidar

ABSTRAK

SAMSIDAR, 2019. Pelaksanaan Fungsi Badan Urusan Logistik dalam Bidang Manajemen Logistik pada Bulog Subdivre VII Makassar (Dibimbing oleh A. Rosdianti Razak dan Muhammad Tahir).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam Bidang Manajemen Logistik pada Bulog Subdivre VII Makassar dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam Bidang Manajemen Logistik pada Bulog Subdivre VII Makassar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan informan sebanyak 11 orang yang dipilih menggunakan teknik metode *purposive sampling*. berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti, yakni : Wakil Kepala Bulog, Kepala Seksi, staf, dan pedagang pasar. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa : Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang manajemen logistik melalui pengadaan sudah berjalan dengan baik terlihat mengenai kebutuhan masyarakat dan berdasarkan kebijakan dan program pemerintah untuk memberikan bantuan bahan pokok khususnya beras kepada masyarakat miskin melalui bantuan sosial dan mengacuh pada standar kualitas yang telah di tentukan, sisi pelaksanaan distribusi sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala cuaca dan faktor transportasi, pelaksanaan pendistribusian bahan pangan dilakukan oleh satker berdasarkan surat penugasan dan Mitra Kerja Pengadaan baik dalam bentuk perusahaan usaha perseorangan, dan sisi Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci : Pelaksanaan , Fungsi Bulog, Manajemen Logistik.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah robbil 'alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala macam nikmat. rahmat dan hidayah-Nya.

Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi junjungan kita, pemberi rahmat bagi alam semesta, yang telah membawa ummatnya dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang yaitu Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga keselamatan dilipahkan pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga Akhir zaman.

Tidak mudah untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar bahwa selayaknya manusia biasa maka tidak akan mungkin dapat hidup dan berkembang tanpa bantuan orang lain.

Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berupaya memberikan informasi tentang Pelaksanaan fungsi Bulog dalam bidang manajemen logistik pada Bulog Subdivre VII Makassar.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan dapat diterapkan oleh masyarakat pentingnya berlalu lintas dengan baik dan benar serta membantu Satlantas dalam menjaga kenyamanan berkendara. Olehnya itu, penulis ucapkan terima kasih

yang tak terhingga kepada orang-orang yang telah menjadi motivator dan penyemangat. Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua kami tercinta Sitana dan Sampe yang tak hentinya mengajarkan arti dari sebuah perjuangan dan makna dari hidup ini, Ayahanda dan Ibunda yang penuh dengan kasih sayang, memotivasi, mendoakan dan mengorbankan segalanya demi kesuksesan penulis. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis, dan terima kasih atas semua cinta kasih serta doa restu yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
2. Kepada Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Kepada Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa mendukung penyelesaian skripsi ini
4. Kepada Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa bersedia memberikan saran dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini
5. Kepada Nasrulhaq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar yang tak henti-hentinya mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Kepada Dr.Hj. Andi Rosdianti Razak. M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi yang kuat kepada penulis dan Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing II, yang walaupun kesibukannya luar biasa tapi masih menyempatkan diri memberi arahan dan masukan demi penyelesaian skripsi.
7. Kepada Tim Penguji yang memberikan tanggapan, kritikan dan saran yang membantu penulis agar skripsi dapat disusun menjadi lebih baik dan teratur.untuk itu ucapan terimakasih kepada Dr.Hj. Andi Rosdianti Razak. M.Si, Abdul Kadir Adys, SH,MM, Dr. Muhammad Tahir, M.Si,dan Dr. Jaelan Usman, M.Si.
8. Kepada pihak BULOG Subdivre VII Makassar, khususnya bagian perawatan kualitas Bapak Surya Efendi, yang telah berpartisipasi dalam proses penelitian penulis, sehingga dapat terselesaikan
9. Kepada suamiku tercinta Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, MSi yang telah memberikan nasehat, saran, motivasi dan arahnya dan dengan setia mendampingi sampai proses penyusunan skripsi ini selesai.
10. Kepada Ibu Nurbiah Tahir S.Sos,M,AP selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat, saran, motivasi dan arahnya mulai awal semester I hingga semester akhir

11. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak pengetahuan dimulai awal semester I hingga semester akhir
12. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
13. Kepada teman-teman se-Jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya angkatan 2015
14. Kepada sahabat-sahabatku Anriani, S.Sos dan Mardatillah, S.Sos, yang senantiasa menemaniku disaat-saat suka maupun duka terutama diakhir proses penyelesaian.
15. Kepada adinda Fita Sari yang telah memberikan motivasi, saran, kritik, dan arahan kepada penulis mulai awal proposal hingga selesainya skripsi
Akhirnya, dengan lapang dada penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini Kepada Allah SWT Jugalah, penulis panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan, senantiasa bernilai ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 30 Agustus 2019



Samsidar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEORISINILAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Konsep Manajemen Logistik	8
B. Perkembangan Perum Bulog di Indonesia	12
C. Fungsi Bulog.....	17
D. Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang Bulog	19
E. Fungsi Bulog dalam Manajemen Logistik	23
F. Kerangka pikir.....	31
G. Fokus Penelitian	32
H. Deskripsi fokus Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	43
B. Pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam bidang Manajemen Logistik.....	50
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Urusan Logistik dalam Bidang Manajemen Logistik Subdivre VII Makassar	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang pemberian penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan nasional adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari adanya tersedianya Pangan yang cukup memadai, hal ini dapat di lihat dari kualitas dan jumlahnya, aman, beragam, memiliki gizi, merata, dan yang terpenting dapat terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat serta tidak bertentangan dengan tuntunan agama, keyakinan, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tersebut, maka Bulog mempunyai fungsi utama dalam bidang manajemen logistik dengan melaksanakan fungsi pengadaan, pengelolaan persediaan, distribusi (penyaluran) serta adanya pengendalian harga. Disamping Bulog juga berfungsi melakukan koordinasi secara fungsional dalam pelaksanaan tugas Bulog, memfasilitasi dan melakukan kegiatan pembinaan terhadap program kegiatan pada

instansi pemerintah di bidang manajemen logistik berupa pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi serta pengendalian harga beras. Serta fungsi lainnya.

Bulog adalah merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengendalikan dan menjaga kondisi stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok atas kebutuhan masyarakat, terutama sekali pada tingkat konsumen. Peran Bulog tersebut kemudian dikembangkan lagi dengan melakukan penambahan yaitu mengendalikan harga produsen melalui instrumen harga dasar yang tujuannya untuk melindungi para petani. Dalam proses perkembangan selanjutnya, peran Bulog semakin strategis dimana Bulog tidak hanya terbatas pada penyediaan beras bagi masyarakat tetapi lebih dari itu Bulog berperan pada stabilisasi dan pengendalian harga serta penyediaan komoditas lainnya seperti jagung, terigu, gula pasir, telur dan daging serta bumbu-bumbu, yang dilakukan secara insidental terutama saat situasi harga meningkat. Sebelum tahun 1998, salah satu tugas penting yang diberikan kepada Bulog oleh pemerintah adalah untuk mengendalikan harga produsen dan menjaga stabilitas harga beras konsumen, serta menyediakan stok beras antar waktu dan antar daerah dalam wilayah NKRI untuk keperluan darurat atau keperluan lainnya. Dimana bobot pengendalian antara harga produsen dengan harga konsumen dapat seimbang.

BULOG memiliki fungsi untuk menjaga tiga pilar ketahanan pangan melalui persediaan yang cukup, akses dan harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat dan melakukan stabilitas harga. Pilar pertama adalah ketersediaan, dimana bulog bertanggung jawab penuh untuk menyerap dan memperoleh stok melalui pengadaan dalam jumlah yang cukup dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya terpenuhinya cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kepentingan tertentu, seperti keadaan darurat dan operasi pasar.

Pilar kedua adalah keterjangkauan, dimana bulog berfungsi mendistribusikan secara merata diseluruh wilayah tanah air melalui moment nasional, maupun moment regional, sehingga ketersediaan pangan dapat di peroleh dengan mudah oleh seluruh masyarakat serta harga yang murah dan terjangkau. Kemudian pilar ketiga yaitu stabilitas harga, dimana bulog memiliki kewajiban untuk menjaga harga khususnya pada kisaran harga yang stabil. Dengan melakukan penyerapan yang dilakukan pada saat panen raya untuk menjaga harga agar tidak jatuh dan melakukan intervensi pasar melalui kegiatan operasi pasar pada saat musim paceklik tiba dan pada saat harga melambung tinggi.

Cita-cita swasembada pangan adalah merupakan impian, harapan, cita-cita serta komitmen bersama karena itu merupakan amanah Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yaitu

untuk mencapai kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Tetapi cita-cita , impian dan harapan itu masih sangat jauh untuk bisa terpenuhi.

Berdasarkan impian untuk swasembada pangan tersebut, maka berkembang pula tugas dan fungsi Bulog. Dimana fungsi utama Bulog adalah manajemen logistik berupa mengelola persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik. Saat ini tantangan untuk menjaga ketahanan pangan khususnya pengelolaan persediaan itu kedepan semakin berat, karena kita menghadapi jumlah penduduk yang semakin bertambah, laju konversi sumber produksi pangan yang tidak terkendali untuk berbagai kepentingan, sementara tidak mudah untuk mendapatkan sumber atau lahan pengganti, disamping itu tantangan perubahan iklim yang semakin tidak jelas yang membuat gagal panen dan terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan ketersediaan pangan (Beras, jagung dan kedelai) yang merupakan tugas dan fungsi Bulog menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga sesuai ayat 3 pasal 2 PerPres Nomor 48 Tahun 2016.

Selain itu, program pemerintah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat kurang mampu, Serta Perum Bulog juga melakukan pendistribusian pangan khususnya beras kepada masyarakat tertentu yang dibuat dalam bentuk program beras miskin dan beras sejahtera (RASKIN/RASTRA). Menurut data BULOG pada tahun 2015 dengan

Rumah Tangga Sasaran (RTS)-Penerima Manfaat sekitar 15.530.897 dan Pagu alokasi Beras Miskin atau Beras Sejahtera sebesar 3.261.448 kg, terealisasi sebanyak 98,18% atau 3.202.022.ton sedangkan pada tahun 2016 sampai awal 2017 telah mencapai 2.782.326.ton atau 99,53% kinerja penyaluran paling tinggi dalam 5 tahun terakhir.

Permasalahan yang kemudian adalah muncul isu-isu yang mempertanyakan kemampuan Bulog dalam melaksanakan fungsinya untuk memenuhi keinginan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, penyediaan pangan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program Raskin dan Rastra, kemudian terbatasnya ketersediaan pangan di seluruh wilayah tanah air yang di rasakan oleh masyarakat semakin langka yang disertai harga yang melambung tinggi.

Kemudian isu lain adalah terkait fungsi Bulog yang dianggap tidak efektif yaitu fungsi pendistribusian pangan yang dianggap tidak merata dan diperparah lagi dengan terjadinya keterlambatan sampai pada tujuan. Sehingga masyarakat kemudian mempertanyakan dimana fungsi Bulog dalam manajemen logistik yang dianggap sangat lemah.

Permasalahan yang lain adalah fungsi Bulog dalam manajemen logistik yaitu fungsi pengendalian atau pengawasan yang dianggap tidak maksimal dilaksanakan baik pada saat pengadaan atau penyediaan stok pangan maupun pada saat proses pendistribusian sehingga terkadang kebutuhan pangan tidak dapat terpenuhi (kekurangan stok)

yang berpengaruh terhadap harga pangan yang tidak terkendali sehingga berdampak pada daya beli masyarakat.

Permasalahan Pelaksanaan fungsi Bulog dalam bidang manajemen logistik ini, tidak saja terjadi pada tingkat nasional tetapi juga terjadi pada wilayah-wilayah tertentu di beberapa provinsi termasuk Sulawesi selatan dan bahkan juga terjadi pada Bulog yang ada dalam wilayah Sub divisi regional VII Makassar.

Bulog Sub divisi regional VII Makassar dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat melalui pelaksanaan fungsi manajemen logistik dianggap tidak efektif terutama dalam fungsi penyediaan dan distribusi pangan kepada pasar dan masyarakat yang tidak merata, belum lagi adanya keterlambatan pasokan dari luar daerah seperti kabupaten Soppeng, Sidrap, Bone, Bulukumba dan Polman sehingga terkadang terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang cukup tinggi pada kisaran Rp. 7.500 yang ditahun sebelumnya hanya Rp. 6.018 jadi selisinya hampir Rp.1.400/kg. Operasi pasar terkadang tidak efektif karena tidak merata terhadap seluruh wilayah yang ada di Kota Makassar. (Tribun Timur.com, Makassar, 14-09-2018).

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mencoba mengelaborasi fungsi Bulog dalam bidang manajemen logistik pada Bulog Subdivre VII Makassar dengan mengangkat judul “

Pelaksanaan Fungsi Bulog dalam bidang Manajemen Logistik pada Bulog Subdivre VII Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam Bidang Manajemen Logistik pada Bulog Subdivre VII Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam Bidang Manajemen Logistik pada Bulog Subdivre VII Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam Bidang Manajemen Logistik pada Bulog Subdivre VII Makassar.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam Bidang Manajemen Logistik pada Bulog Subdivre VII Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai referensi dalam memberikan informasi kepada instansi terkait pelaksanaan fungsi Bulog dalam bidang manajemen logistik pada Bulog Subdivre VII Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam Bidang Manajemen Logistik pada Bulog Subdivre VII Makassar agar masyarakat dapat memahami fungsi BULOG sebagai penyedia pangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen Logistik

Manajemen logistik adalah perpaduan yang seimbang dari seluruh komponen yang membentuk sistem logistik. Perpaduan yang seimbang itu, idealnya adalah dengan mengatur operasi logistik tercapai usaha pelayanan yang diinginkan dengan total biaya yang serendah mungkin. Operasi logistik dapat dianggap sebagai sekelompok siklus usaha. Dengan demikian, dapat kita peroleh suatu orientasi dasar yang dapat digunakan untuk analisis disain dan administrasi operasional. Aspek operasional logistik ini adalah mengenai manajemen pemindahan (movement) dan penyimpanan material dan produk jadi perusahaan.

Sebelum mengemukakan gambaran tentang manajemen logistik, maka berikut ini akan dikemukakan konsep manajemen dan konsep logistik.

1. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *to manage*, yang dalam bahasa Indonesia berarti mengatur, mengendalikan, mengelola, mengurus. Dalam ilmu administrasi kata manajemen berasal dari bahasa latin yaitu *managere* yang artinya menangani. Manager diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dalam bentuk kata kerja *to*

manage, dengan kata benda management, yaitu manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen, yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

Menurut Arismunandar (2002: 17), mengemukakan bahwa manajemen adalah sebagai segala aktivitas dalam mengatur, mengkoordinasikan dan memanfaatkan sumber daya organisasi bagi pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Hasibuan (2011: 37), mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Stoner dalam Arifin dan Hadi (2007: 64), mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menurut Burhanuddin dalam Anwar (2015: 1), mengemukakan bahwa manajemen adalah kegiatan yang menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Gullick dalam Satori (2006: 10), mengemukakan bahwa manajemen menjadi suatu ilmu jika teori-

teorinya mampu menuntun manajer dengan kejelasan apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu. Mungkin mereka meramalkan akibat-akibat dari tindakannya kualitas pimpinan yang penuh enerjik adalah pemecahan masalah dari berbagai pengharapan, mutu keputusan yang tepat yang diambil oleh manajer yang mengubah input menjadi proses sehingga menjadi output yang berkualitas dapat memberi pelayanan yang dapat memuaskan terhadap masyarakat.

2. Konsep Logistik

Logistik tidak hanya bicara tentang penyediaan dan penyaluran (distribusi) barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan konsumen atau masyarakat, tetapi logistik pada hakekatnya memiliki peran penting dalam proses produksi dan pemasaran produk hasil produksi, sehingga produk yang dihasilkan dapat sampai ketangan konsumen. Logistic tidak hanya terkait pada usaha penyediaan barang dan jasa manufaktur, tetapi lebih dari itu, terkait dengan seluruh organisasi termasuk pemerintahan, seperti Rumah Sakit, sekolah, perbankan, organisasi jasa dan organisasi jasa finansial lainnya.

Pengertian logistik adalah suatu ilmu pengetahuan atau seni dalam melakukan proses penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan dan penghapusan terhadap berbagai barang atau alat-alat tertentu. Di samping itu, logistik juga dapat di artikan sebagai serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, implementasi, hingga pengawasan

terhadap sesuatu proses perpindahan, baik itu barang/jasa, energy, atau sumber daya lainnya, dari titik awal menuju titik penggunaan barang dan jasa tersebut.

Menurut Donald Walters (200: 3-4), mengemukakan bahwa logistik adalah fungsi yang melibatkan perpindahan, pengaturan perpindahan barang, dan penyimpanan material dalam perjalanannya dari pengirim awal, melalui rantai pasok dan sampai kepelanggan akhir. Sedangkan menurut Kallock dalam Kusumaastuti (2014: 3), mengemukakan bahwa manajemen logistic merupakan hubungan yang sederhana antara factor-faktor yang saling bebas, yaitu pembuatan (yang terdiri dari penjadwalan utama, penjadwalan produksi, pengaturan material dan produksi), pengiriman (yang berhubungan dengan perencanaan lokasi, pemindahan material, pengangkutan dan penyaluran barang) serta penjadwalan (berkaitan dengan peramalan, pelayanan pelanggan, pelayanan pesanan, dan pengiriman).

Semua kegiatan logistik, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tersedianya suatu barang yang tepat pada waktunya, sehingga perusahaan atau lembaga yang ada dapat melaksanakan serangkaian kegiatan logistik, berupa :

1. Proses pengadaan barang (*procurement*)
2. Kegiatan produksi (*manufacturing support*)
3. Distribusi (*physical distribution*).

Dengan demikian dapat di kemukakan bahwa manajemen logistic itu adalah suatu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik dengan tujuan agar pergerakan sumber daya manusia (personil) dan barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Manajemen logistik adalah bagian dari proses *supply chain management* yang memiliki fungsi penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efektifitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi, hingga ketitik konsumsi untuk memenuhi keperluan konsumen.

Menurut Indriyi dan Mulyono (1998: 23), menyebutkan bahwa manajemen logistic adalah pengembangan operasi yang terpadu dari kegiatan pengadaan atau pengumpulan bahan, pengangkutan atau transportasi, penyimpanan, pengepakan dan pendistribusian, serta pengaturan terhadap kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Mustafa (2017: 6-9) lebih menekankan pada fungsi-fungsi manajemen logistik yang penting diperhatikan, yaitu :

1. Perencanaan (*planning*)
2. Penentuan kebutuhan
3. Penganggaran/pembiayaan
4. Pengadaan
5. Penyimpanan/pegudangan
6. Pemeliharaan/perawatan

7. Distribusi (*distribution*)
8. Inventarisasi
9. Penghapusan atas barang
10. Pengawasan/pengendalian.

B. Perkembangan Perum Bulog di Indonesia

Perkembangan Bulog tidak dapat dilepas dari sejarah perkembangan pangan di Indonesia mulai sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Secara umum tugas Bulog yaitu penyediaan pangan untuk masyarakat dengan harga yang terjangkau di seluruh daerah di Indonesia serta pengendalian harga pangan ditingkat konsumen dan produsen. Instrumen untuk bisa mencapai tujuan tersebut bisa saja berubah setiap saat sesuai kondisi dan keadaan yang berkembang.

Campur tangan pemerintah dalam komoditas pangan diawali sejak tahun 1933, yaitu pada zaman pemerintahan Belanda. Saat itu juga, Pemerintah Belanda mengatur kebijakan pangan dan lebih spesifik adalah beras, dengan melakukan penghapusan kegiatan impor beras secara bebas dan melakukan pembatasan kegiatan impor tersebut melalui sistem lisensi. Yang melatarbelakangi sehingga pemerintah Belanda ikut mencampuri dalam penyediaan pangan khususnya beras saat itu adalah karena terjadi peningkatan harga beras yang cukup tinggi

dan merosot tajam pada tahun 1930an, sehingga petani mengalami kesusahan untuk membayar pajak.

Menjelang pecahnya perang dunia kedua, kemudian pemerintah belanda memandang perlunya untuk secara resmi/sah dan permanen mendirikan suatu lembaga yang khusus menangani pangan yaitu tanggal 25 april 1939, sehingga lahirlah suatu lembaga pangan yang di kenal dengan nama *Voeding Middelen Founds* (VMF). Kemudian Lembaga pangan ini kemudian banyak mengalami perubahan nama seiring perkembangan yang ada dan serta perubahan fungsi dan perannya.

Secara ringkas, perkembangan forum Bulog dapat dilihat yaitu sebagai berikut :

1. Pada Tahun 1939 didirikan *Voeding Middelen Founds* yang diberi bertugas membeli, menjual dan mengadakan persediaan makanan.
2. Pada Tahun 1942-1945 di zaman kependudukan Jepang *Voeding Middelen Founds* Dibekukan lalu kemudian diganti dengan lembaga baru yaitu *Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha*.
3. Tahun 1945-1950, terdapat dua organisasi, yaitu di daerah RI didirikan lembaga pengawasan makanan rakyat disingkat PMR dan pada tahun 1947-1948 dibentuk menetrihan persediaan makanan rakyat di daerah yang diduduki Belanda, VMF (*Voeding Middelen*

Founds) kemudian dihidupkan kembali dengan tugas dan fungsinya seperti yang telah dijalankan di tahun 1939.

4. Tahun 1950, dibentuknya yayasan bahan makanan (BAMA) Di tahun 1950-1952 yang tugasnya adalah menjual, membeli dan mengadakan persediaan pangan bagi masyarakat.
5. Tahun 1952 fungsi dari yayasan bahan makanan (YUBM) (Tahun 1952-1958) disini lebih banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masalah distribusi/pemerataan pangan. Dalam masa periode ini mulai dilaksanakan kebijakan dan usaha-usaha untuk stabilisasi harga beras melalui bantuan pendanaan di pasaran.
6. Tahun 1958 selain lembaga YUBM yang diberi tugas untuk impor maka dibentuklah YBPP (Yayasan badan pendirian padi) tahun 1958-1964 yang dibentuk di seluruh daerah dan ditugaskan untuk membeli padi. Meningkatnya harga beras dan terjadi tekanan-tekanan dari berbagai golongan penerima pendapatan tetap, maka pemerintah pada periode tersebut meninggalkan prinsip stabilitas melalui mekanisme pasar dan berorientasi pada distribusi fisik.
7. Tahun 1967 KOLOGNAS Dibubarkan kemudian diubah namanya menjadi BULOG (Badan Urusan Logistik), tahun 1967-1969 yang dibentuk dengan KEPRES Nomor 114/KEP 1967 Berdasarkan KEPRES RI No.272/1967 Bulog dinyatakan sebagai *single*

purchasing Agency lalu bank Indonesia yang dipilih sebagai *Single Financy agency* Melalui Inpres No.1/1968.

8. Pada tanggal 22 januari 1969 Reorganisasi Bulog berdasarkan KEPRES No.11/1969, Struktur organisasi Bulog diganti. Tugas Bulog adalah untuk membantu pemerintah dalam menstabilkan harga pangan. Pada Tahun 1969 mulailah dibentuk beberapa konsep dasar tentang kebijakan pangan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional diantaranya, konsep *Floor and ceiling price*, konsep *bufferstop*, dan sestem tata cara pengadaan, pengangkutan penyimpanan dan penyaluran.

Tugas Bulog semakin bertambah, Komoditas yang kemudian dikelola oleh lembaga ini semakin bertambah menjadi gula pasir, (1971) terigu (1974), kedelai (1977), jagung (1978), kacang hijau (1979), kacang tanah (1979), , kacang hijau (1979)daging ayam dan kacang hijau (1979), Pada Hari Raya Natal/Tahun Baru. Kebijakan stabilisasi harga beras yang berorientasi pada *Bufferstock* dimulai tahun 1970.

Tugas utama BULOG di era 1980-an Menstabilkan harga pangan. Orientasi *bufferstock* yang ditunjang dengan dibangunnya gudang-gudang penyimpanan yang tersebar di wilayah Indonesia. Kemudian struktur organisasi BULOG mengalami perubahan sesuai Kepres RI No. 39/1978 tanggal 6 November 1978 dan diberi tugas membantu

persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga untuk kepentingan konsumen maupun petani sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah.

Penyempurnaan struktur organisasi BULOG terus dilakukan. Melalui Kepres RI No.50/1995 Badan Urusan Logistik yang pada saat itu diberi tugas mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, kedelai, gula, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya. Namun, seiring dengan berkembangnya ekonomi global, tugas utama BULOG disesipik melalui Kepres No.45 / 1997 yang hanya melakukan pengendalian harga atau stabilisasi harga pangan dan mengelola persediaan beras dan gula. Namun hanya beberapa bulan kemudian, sesuai LOI tanggal 15 Januari 1998, Bulog hanya menguasai Beras.

Pelaksanaan liberalisasi bahan pangan khususnya beras itu mulai dilaksanakan sesuai Kepres RI No. 19 tahun 1998 tertanggal 21 Januari 1998 dimana tugas utama Bulog ditinjau dan diperbahruai kembali melalui Kepres Nomor 29 tahun 2000 tanggal 26 Februari 2000, dimana tugas yang harus dilaksanakan Bulog adalah tugas umum pemerintah dan pembangunan ekonomi di bidang manajemen logistik.

C. Fungsi BULOG

Pada awal berdirinya, Bulog sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1978 bertugas melakukan pengendalian harga beras, gandum, gabah serta bahan pokok yang lain dengan tujuan untuk menjaga harga tetap stabil dan terkendali baik bagi produsen ataupun konsumen terutama pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada era sekarang ini, beberapa fungsi Bulog secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pada bidang manajemen logistik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan umum pemerintah.
2. Penyelenggara kegiatan pada bidang usaha jasa logistik.
3. Sebagai pelaksana kegiatan pada bidang operasi.
4. Melakukan perencanaan pada bidang-bidang berikut, antara lain keuangan, sumber daya manusia dan jasa logistik.
5. Mengelola sumber daya manusia yang tersedia yang akan melaksanakan tugas Bulog supaya berhasil serta mempunyai daya guna.
6. Melakukan pengawasan terhadap segala bentuk tugas dan fungsi yang dilakukan di lingkungan Bulog.
7. Mengelola sumber daya manusia dan keuangan bulog.

Memasuki Era Reformasi di awal tahun 2000an beberapa lembaga pemerintahan mengalami refitalisasi serta reformasi termasuk Badan Urusan Logistik (BULOG). Bulog sebagai lembaga pemerintah dengan fungsi utamanya dalam manajemen logistik diharapkan bisa lebih berhasil terutama dalam mengelola persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras serta usaha-usaha jasa logistiknya.

Adapun fungsi utama Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah melakukan Pengkajian dan Penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik yang meliputi ; Pengadaan, Pengelolaan Persediaan, distribusi pangan serta pengendalian harga beras.

Dalam melaksanakan fungsi Bulog dalam manajemen Logistik tersebut, Adapun nilai-nilai dasar yang menjadi perhatian, yaitu :

1. Kualitas – Inti dari nilai dasar ini adalah perusahaan atau organisasi, mulai dari jajaran manajemen, serta semua pegawai atau staf sepakat untuk selalu berusaha memperhatikan kualitas produk dan pemberian pelayanan terhadap warga masyarakat.
2. Integritas – Inti dari nilai dasar integritas ini adalah adanya kesatuan antar pribadi , pengelola, maupun organisasi yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, prinsip moral, serta memperhatikan nilai etika, menuju tata kelola perusahaan yang lebih baik yang efektif dan efisien.

3. Tim Kerja – Inti dari nilai dasar ini sesungguhnya adalah keseluruhan staf atau karyawan atau tim kerja dalam perusahaan harus bekerja secara total dan fokus.
4. Inovatif – Inti dari nilai dasar inovatif ini adalah mampu berpikir dan mengembangkan kreativitas guna memperoleh hasil berupa berbagai hal baru dalam kerja.
5. Responsif – Inti nilai dasar ini adalah pimpinan dan pegawai dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat ketika terjadi perubahan.
6. Amanah – Inti nilai dasar amanah ini adalah nilai dimana setiap orang selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik mungkin dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan perusahaan.
7. Niat – Inti nilai dasar ini adalah dalam menjalankan tugas serta kewajibannya maka setiap karyawan atau staf harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas.

D. Tugas dan Tanggung Jawab BULOG

Tugas secara umum merupakan kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus di selesaikan seseorang dalam pekerjaannya. Dapat pula diartikan sebagai suatu pekerjaan yang wajib diselesaikan atau dikerjakan karena pekerjaan tersebut sudah menjadi tanggung jawab dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah suatu keharusan dalam melakukan semua kewajiban atau tugas yang

telah di amanahkan kepada seseorang sebagai bentuk dari wewenang yang telah diterima atau dimilikinya. Tanggung Jawab tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Jika seseorang menerima wewenang maka Tanggung Jawab juga harus diterima terutama hal-hal yang wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu lembaga secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditentukan, visi dan misi organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan aktifitas atau kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dalam setiap unit atau bagian. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam suatu konkrit dan praktis sesuai kemampuan dan tuntutan dari masyarakat. Tugas dan wewenang adalah suatu kesatuan yang saling terkait dan berhubungan antar elemen yang ada dalam organisasi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebut bahwa suatu organisasi menyelenggarakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

A. Tugas Bulog

Perusahaan Umum BULOG Sebagai lembaga yang ditugasi pemerintah melaksanakan kebijakan peyediaan pangan, peran dan tugas BULOG di masa depan sangat terkait dengan rumusan kebijakan yang ditetapkan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa BULOG dapat menyesuaikan diri terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan

hal ini dikarenakan BULOG memiliki jaringan logistik yang luas dan menyebar.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut dinyatakan bahwa pemerintah telah memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Bulog untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diemban untuk menjaga ketersediaan pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa:

1. Pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah.
2. Penyediaan Pengamanan harga yang stabil pangan pokok beras pada ditingkat produsen dan konsumen.
3. Melaksanakan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu, seperti beras miskin (Raskin).
4. Pelaksanaan impor beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kondisi ketersediaan dalam negeri.

Selain menjalankan penugasan sebagai mana dimaksud di atas, maka pemerintah juga telah memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan Umum Bulog untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional, antara lain :

1. Melakukan usaha Pengembangan serta memajukan industri berbasis beras, termasuk produksi padi atau gabah serta pengolahan gabah dan beras yang berkualitas.

2. Pengembangan pergudangan beras.

Di samping hal tersebut di atas, Perusahaan Umum BULOG dalam rangka ketahanan pangan, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus, berupa:

1. Pengamanan harga pangan lainnya.
2. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah untuk keperluan lainnya.
3. Penyediaan dan pendistribusian pangan lainnya.
4. Pelaksanaan impor pangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan ketersediaan dalam negeri.
5. Pengembangan industri berbasis pangan lainnya.
6. Pengembangan pergudangan pangan lainnya.

B. Wewenang BULOG

Perusahaan umum (Perum) Bulog (Badan Urusan Logistik) adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang bertugas mengurus tata niaga beras. Bulog dibentuk pada Tanggal 10 Mei 1967. Bulog juga merupakan Badan Usaha Milik Negara dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan serta tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan dan usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya visi misi dan tujuan perusahaan.

Pemerintah memberikan penugasan kepada Perusahaan umum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen dan produsen untuk berbagai jenis pangan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai dan lain-lain.

Upaya menyelenggarakan fungsi, BULOG mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan nasional secara makro dibidangnya
- b. Merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Kewenangan yang melekat dan pelaksanaan kewenangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan serta Perumusan kebijakan tertentu dibidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras.
 - 2) Perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.

Disamping kewenangan tersebut di atas, perusahaan umum Bulog dalam menjalankan penugasan dari pemerintah melakukan:

- a. Pengamanan harga pangan ditingkat konsumen dan produsen
- b. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah
- c. Penyediaan dan pendistribusian pangan

- d. Pelaksanakan impor pangan yang diperlukan dengan memperhatikan ketersediaan dalam negeri dengan tetap berpedoman pada tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengembangan industri berbasis pangan.
- f. Pengembangan perdagangan pangan memadai dan representatif.

E. Fungsi Bulog dalam Bidang Manajemen Logistik

1. Pengadaan

Ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan pimpinan dan seluruh komponen dalam organisasi termasuk di dalamnya kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk Bulog Subdivre VII, Salah satu kegiatan yang perlu perencanaan yang matang dalam kegiatan manajemen logistik adalah pengadaan atau penyediaan kebutuhan pangan pokok dan kebutuhan lainnya.

Pengadaan merupakan kegiatan atau usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah ditetapkan dalam perencanaan, melalui penentuan kebutuhan dengan melakukan peramalan berdasarkan pengalaman dan kondisi yang ada termasuk di dalamnya penganggaran. Dalam melakukan pengadaan dibutuhkan proses perencanaan dan penentuan kebutuhan serta rencana pembiayaan dan penganggaran.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Pemerintah menetapkan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya diawali dengan identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima.

Menurut Weele (2010: 25), mengemukakan bahwa pengadaan adalah perolehan barang atau jasa yang dibeli berdasarkan biaya yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi.

Sedangkan menurut Cristopher dan Schooner (2007: 34), mengemukakan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan/organisasi di lihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pendistribusian (pengiriman) dan harga yang terjangkau.

Sedangkan menurut Budiharjo dan Hayie Muhammad (2008: 23), pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional yaitu efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminatif dan akuntabilitas.

Lebih lanjut Budiharjo dan Hayie Muhammad (2008: 24), mengemukakan prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Efisiensi.

Prinsip efisiensi dalam pengadaan adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal.

2. Efektif

Prinsip efektif dalam pengadaan adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

3. Persaingan sehat

Prinsip ini adalah prinsip dalam pengadaan dimana ada persaingan antar individu dan kelompok atau perusahaan/lembaga yang didasarkan pada etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

4. Terbuka

Prinsip terbuka dalam pengadaan adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.

5. Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengadaan adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat.

6. Tidak diskriminatif

Prinsip tidak diskriminatif dalam pengadaan adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan.

7. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pengadaan adalah pertanggung jawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi yang bisa bertahan, berkembang dan bahkan menjadi organisasi yang modern dan maju adalah organisasi yang memiliki pola perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang selalu konsisten dan mengikuti perkembangan zaman.

2. Distribusi

Kegiatan distribusi adalah salah satu kegiatan yang penting dalam suatu organisasi yang menawarkan barang dan jasa. Kegiatan pendistribusian dalam organisasi biasanya terjadi pada aktivitas pemasaran. Kegiatan pendistribusian adalah kegiatan yang mampu menciptakan pola arus saluran pemasaran yang lebih dikenal sebagai arus saluran distribusi.

Fungsi distribusi adalah membentuk utilitas dan peralihan kepemilikan dari pada suatu produk. Oleh karena itu kegiatan pendistribusian merupakan aktivitas penciptaan nilai tambah pada barang dan jasa. Dimana nilai tambah tersebut dapat berupa nilai kegunaan, tempat dan waktu.

Menurut Assauri (2004: 12) mengemukakan bahwa distribusi adalah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat. Kegiatan ini dibutuhkan kemampuan dan keahlian yang cukup agar bias tepat waktu dan tepat sasaran.

Kemudian menurut Soekartawi (2002: 77) mengemukakan bahwa distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai hingga konsumen akhir. Pengiriman dan penyaluran yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam organisasi/lembaga.

Dengan demikian kegiatan pendistribusian dalam organisasi atau perusahaan sangat memerlukan adanya kemampuan sumber daya manusia atau staf (pegawai) yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam bekerja. Sehingga proses distribusi barang dan jasa dapat sampai pada waktunya serta merata dan tepat dalam penggunaannya.

3. Pengendalian (pengawasan)

Kegiatan pengendalian dan pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang harus dilakukan oleh semua manajer atau pimpinan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif organisasi.

Dalam proses pencapaian tujuan organisasi yang efektif tersebut, diperlukan pengendalian atau pengawasan terhadap program atau kegiatan yang ada dalam perencanaan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan koreksi atas pelaksanaan kegiatan diperlukan agar tetap berada pada perencanaan yang telah di buat sebelumnya.

Pengendalian dan pengawasan adalah kegiatan membantu merumuskan kebijaksanaan dengan tujuan memberikan pengawasan pada semua komponen yang terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai kepada proses pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:534).

Menurut Jones and George (2003:331) memberikan gambaran tentang pengertian pengendalian (Controlling) adalah proses dimana para pimpinan (manajer), atau CEO dalam organisasi melakukan pemantauan dan pengaturan bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan atau aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Senada dengan hal tersebut diatas, Handoko (2009: 359), mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk

menjamin tujuan dalam organisasi dan manajemen dapat tercapai. Hal ini menyangkut cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam kegiatan pengendalian, para pimpinan atau manajer memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi bekerja seperti yang dikehendaki atau justru sebaliknya, serta bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan bagaimana harus diubah jika tidak bekerja secara maksimal.

Sedangkan menurut Robbins dan Coulter (2005: 211), mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan aktivitas organisasi untuk menentukan apakah aktivitas sesuai dengan yang direncanakan dan sebagai proses memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi.

Lebih lanjut Manullang (2004: 173), mengemukakan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, memberi penilaian dan mengecek bila perlu dengan tujuan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang di rencanakan.

Dalam organisasi secara umum dikenal adanya 4 langkah dalam pengendalian dan pengawasan, yaitu : 1) Menentukan standar, 2) Mengukur kinerja, 3) Membandingkan kinerja aktual dengan standar, 4) Mengambil tindakan perbaikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan merupakan unsur penting dalam organisasi dan manajemen yang merupakan indikator yang menentukan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah di tentukan. Dalam pengawasan juga terdapat suatu tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang sangat penting dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan atau program dalam organisasi.

Organisasi yang maju adalah organisasi dimana para manajer (pemimpin) memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap semua aktifitas dan kegiatan-kegiatan organisasi mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian potensi yang dimiliki organisasi baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, maupun pelaksanaan kegiatan atau program sampai kepada pengawasan sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari akibat pengendalian organisasi yang lemah.

4. Usaha Jasa Logistik

Keberadaan jasa logistik sangat penting jika dinilai dari fungsi secara umum logistik tersebut. Penyediaan jasa logistik adalah komponen kedua yang menghubungkan produk dari hasil bisnis yang berasal dari pabrik ke konsumen atau masyarakat.

Usaha jasa logistik yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dilakukan oleh anak perusahaan Bulog seperti jasa prima logistik Bulog yang disingkat JPL.

Kegiatan usaha jasa logistik yang dilakukan perusahaan Umum Bulog dalam mengembangkan bisnis usahanya terdiri dari:

1. Usaha logistik
2. Melakuykan survey serta pemberantasan hama
3. Menyediakan karung plastik
4. Usaha Pengangkutan
5. Melakukan usaha perdagangan bahan pangan dan usaha eceran.

Usaha jasa logistik Bulog ini menjalankan usaha dibidang *Freight Forwarding* (jasa transportasi nasional), *warehousing* (jasa pergudangan Profesional) dan *Project Shipment* (Jasa pengiriman barang), jasa logistik dan angkutan serta usaha pendukung lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan tetap memperhatikan atauran main dalam perundang-undangan yang berlaku.

F. Kerangka Pikir

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional

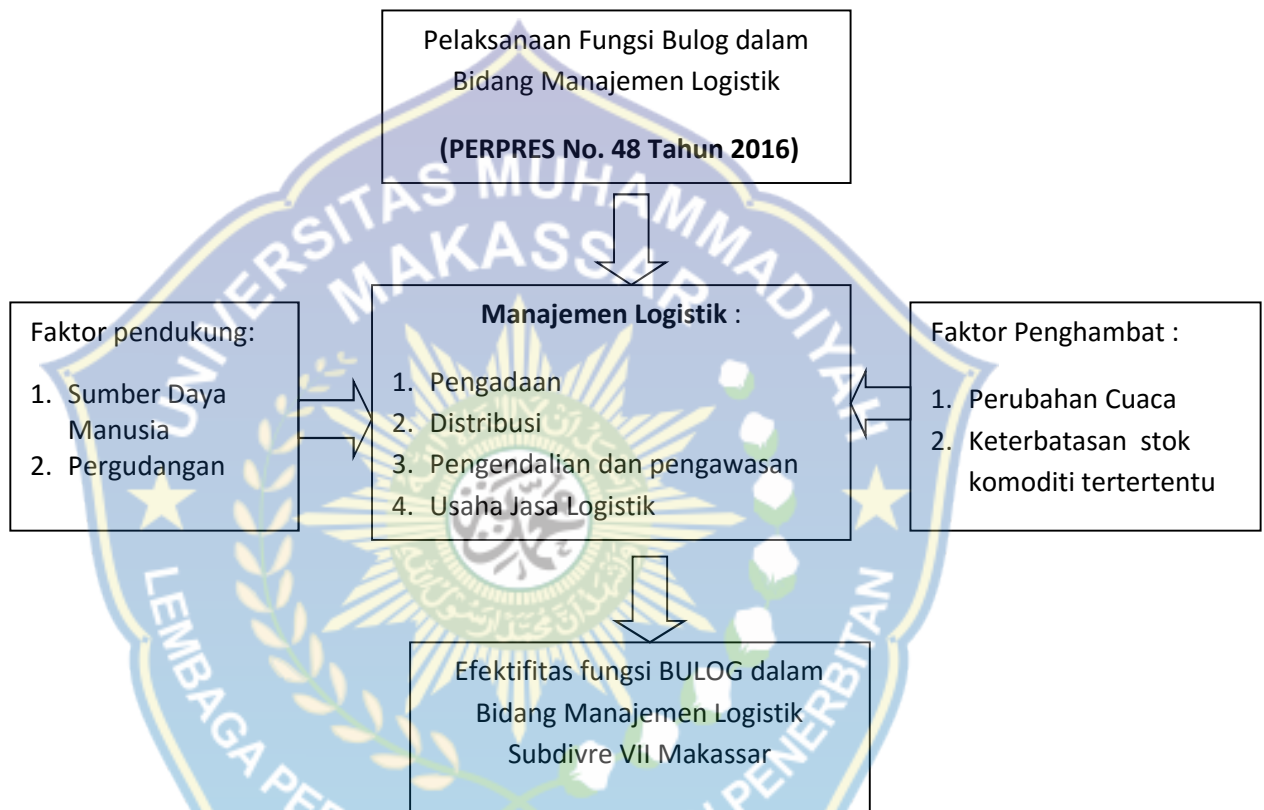
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2016 tentang penugasan kepada perusahaan umum BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional di tanah air. Di dalam Peraturan Presiden tersebut dimuat hal-hal yang berkaitan fungsi BULOG dalam bidang manajemen logistik.

Dalam Peraturan Presiden RI tersebut, dinyatakan bahwa fungsi perusahaan Umum BULOG dalam bidang manajemen logistik terdiri dari (1). Pengadaan, (2). Distribusi, (3). Pengendalian dan pengawasan, (4). Usaha jasa logistik. Dimana Bulog diharuskan melakukan kegiatan sesuai fungsinya dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dari sisi ketersediaan pemerintah melalui Bulog memberikan jaminan harga pasar untuk hasil produksi, peningkatan produksi akan memperkuat ketersediaan pangan, pengelolaan penyediaan pangan, pemerataan stok antar wilayah sesuai kebutuhan dan distribusi, serta pelaksanaan pengendalian terhadap harga pangan serta usaha jasa logistik.

Kemudian dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai amanah Peraturan Presiden kepada Perum BULOG tersebut, maka perlu diketahui pula faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Bulog dalam manajemen logistik terkhusus pada Perum Bulog subdivre VII yang ada Makassar.

Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut di atas, maka dapat disusun suatu kerangka konsep yang dijabarkan melalui bagan kerangka pikir berikut:

Bagan Kerangka Pikir



G. Fokus Penelitian

Melihat gambaran sederhana di atas, penulis menitikberatkan pada fokus penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi BULOG dalam Bidang Manajemen Logistik di Kota Makassar. Selain itu penulis juga akan meneliti lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

fungsi BULOG dalam bidang Manajemen Logistik, yaitu : Pengadaan, Distribusi, Pengendalian harga pangan serta usaha jasa logistik.

H. Deskripsi fokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman agar memudahkan penelitian, maka penulis mencantumkan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioprasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pengadaan yaitu kegiatan penyediaan yang dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar tanpa terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan atau pasokan kebutuhan masyarakat akan pangan pada Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divre VII Makassar.
2. Distribusi adalah kegiatan berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian bahan pangan dari pemerintah melalui kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divre VII pada konsumen atau masyarakat sehingga penggunaannya sesuai yang diperlukan baik jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan.
3. Pengendalian dan Pengawasan yaitu proses pengaturan berbagai faktor agar kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan dalam rencana pada kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divre VII. Dengan melakukan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan agar tujuan tercapai.

4. Usaha jasa logistik yaitu kegiatan atau usaha lainnya yang dilakukan dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi organisasi terutama dalam penyediaan barang dan jasa bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divre VII.

5. Faktor pendukung terhadap pelaksanaan fungsi Bulog dalam pengadaan, pengelolaan persediaan pangan, distribusi dan pengendalian pangan serta usaha jasa logistik pada Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divre VII Makassar.

1. Sumber daya manusia,

Keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya salah satunya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, dalam hal ini pegawai atau aparaturnya dalam organisasi tersebut.

2. Pergudangan

Salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan usaha bagi Bulog adalah tersedianya pergudangan sebagai tempat penyimpanan barang baik pada saat sebelum di pengadaan maupun pada saat sebelum didistribusi.

6. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan fungsi Bulog dalam bidang manajemen logistik pada subdivre VII Makassar :

1. Perubahan cuaca

Perubahan cuaca yang tidak menentu dan selalu berubah mengakibatkan gangguan terhadap kelangsungan kegiatan usaha pengadaan dan pendistribusian serta kegiatan lainnya terutama pengembangan usaha di bidang pertanian yang produksi dan kualitasnya sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca.

2. Keterbatasan stok untuk komoditas tertentu

Faktor penghambat lainnya dalam mengembangkan pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik pada BULOG Subdivre VII adalah ketersediaan stok yang kurang untuk komoditas tertentu seperti gula, terigu, daging dan lain-lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang di butuhkan penulis dalam penelitian ini yaitu selama 2 (dua) bulan, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Juli 2019 dengan lokasi penelitian ialah Kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divre VII Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.42 Panaikang Kota Makassar. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor BULOG karena Kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) merupakan penyedia pangan dan kebutuhan lainnya yang terbesar khususnya beras di wilayah kota Makassar dan sekitarnya.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang menghasilkan data yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi Bulog dalam bidang manajemen Logistik di Subdivre VII Makassar.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian fenomenologi yaitu bentuk penelitian yang meneliti fenomena khusus terkait masalah-masalah dalam pelaksanaan fungsi Bulog dalam bidang Manajemen

logistik dengan memberi gambaran dan penjelasan dari lokasi penelitian secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari orang pertama dan didapatkan secara langsung tanpa perantara. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala sub divisi regional dalam hal pengadaan, pengelolaan dan pendistribusian pangan dan juga mitra kerja badan urusan logistik untuk mendapatkan data yang akurat

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari para informan yang terdapat di kantor bulog sub divre VII Makassar, pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian pangan, mitra kerja bulog serta masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pencatatan dokumentasi yang telah ada sebelumnya. Peneliti melakukan studi literatur untuk mendapatkan data dari sumber yang sudah ada.

Misalnya, dokumentasi, hasil penelitian sebelumnya, maupun dari berita aktual.

D. Informan Penelitian

Pada penentuan informan di dalam penelitian ini sebagai narasumber yang akan diwawancarai secara mendalam dimana peneliti memilih atau menentukan informan di pandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti . Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang memiliki peran dalam mewujudkan pelaksanaan fungsi BULOG dalam bidang manajemen logistik subdivre VII Makassar

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

No	Nama Informan	Jabatan	Inisial
1.	Fandi Kurniawan	Wakil Kepala Subdivre	FK
2.	Ira Misnawati	Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan	IM
3.	Muhammad Chaidir F	Kepala Seksi Operasional dan Pelayanan Publik	MCF
4.	Nini Mariani Kadir	Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan	NMK
5.	Muhammad Adi Purwanto	Staf Seksi Gasar dan Pengadaan	MAP
6.	Syamsurya Efendi	Staf Perawatan Kualitas	SE
7.	Aulia Akbar	Staf Operasional dan Pelayanan Publik	AA
8.	Hasnawati	Pedagang pasar Pa'baeng-baeng	HW

9.	Ulianti	Pedagang Pasar Hertasning	UA
10.	Indah	Pedagang Pasar Terong	ID
11.	Dg. Sangging	Pedagang Pasar Sunggu Minasa Gowa	DS
12.	Anriani	Masyarakat Pembeli	AA

Adapun informan yang di pilih pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* . berdasarkan pertimbangan peneliti. Tujuan dari penggunaan *purposive sampling* ini adalah untuk mengambil informan secara subjektif, dengan menganggap bahwa informan yang di ambil itu merupakan perwakilan (*refresentatif*) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung dan tepat pada sumbernya bisa dilakukan secara profesional demi keakuratan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang

ditentukan. Diantaranya, Wakil Kepala Subdivre VII Makassar, Direktur pengadaan, Devisi Pengadaan Pangan Pokok dan beberapa staf Bulog Subdivre VII Makassar.

2. Observasi, merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Bulog di subdivre VII Makassar, dimana peneliti menjadi bagian dari organisasi dengan ikut serta di beberapa kegiatan secara langsung namun terbatas pada kegiatan tertentu.
3. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, majalah bisnis, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-undang dan media informasi lainnya yang ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi BULOG dalam bidang manajemen logistik subdivre VII Makassar.
4. Dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian, baik dalam bentuk buku, tulisan angka, berupa gambar maupun laporan-laporan yang ada dan tersedia pada Kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divre VII.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menurut model Miles dan Huberman menggunakan 3 (tiga) komponen utama dalam Sugiono (2012:42), yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang ditemukan di lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak, untuk itu peneliti harus membuat catatan dengan teliti dan terperinci. Dalam reduksi data dilakukan pemilihan data yang penting, dengan membuat kategori (Pengelompokan data), dan membuang yang tidak di pakai atau di gunakan untuk kepentingan penelitian. Semakin lama waktu peneliti melakukan penelitian di lapangan, maka data yang akan diperoleh akan semakin banyak dan bertambah rumit. Oleh karena itu peneliti perlu melakukan analisis data dengan cara mereduksi data. Yaitu dengan membuat inti sari dengan menentukan beberapa hal yang bersifat pokok, serta berfokus padahal yang di anggap penting, kemudian menemukan tema beserta polanya kemudian menghilangkan hal-hal yang di anggap tidak penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang di temukan dilapangan dapat diolah dengan memberikan penjelasan singkat serta data disajikan kedalam bentuk tabel, grafik, pie chard sehingga data terorganisir dan akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dapat di uraikan secara singkat dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data awal yang diperoleh . kesimpulan merupakan temuan dari penelitian yang

dapat berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya masih remang-remang, setelah diteliti menjadi jelas. Dengan kata lain, pada tahap awal kesimpulan yang akan di kemukakan akan bersifat sementara, dimana kesimpulan akan berubah jika pada tahap selanjutnya peneliti tidak mendapatkan bukti yang jelas sebagai pendukung untuk mengumpulkan data berikutnya. Namun jika intisari dari data dari tahap pertama memiliki bukti yang jelas dan tidak berubah-ubah ketika peneliti melakukan penelitian kembali dilapangan, maka inti sari yang kemudian akan diuraikan akan menjadi inti sari yang pasti.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data yang diperoleh adalah dengan melakukan ujian keabsahan data. Triangulasi adalah gabungan metode yang di pakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan prespektif yang berbeda. Lebih lanjut Sugiono kemudian memisahkan triangulasi dalam 3 jenis, yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber adalah membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan

yang di katakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas waktu dalam melakukan perubahan yang akan terjadi dari waktu ke waktu serta mendapat data sah melalui observasi, maka peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan tetapi perlu dilakukan berulang sampai mendapatkan data yang valid.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk di aduh atau di padukan. Untuk ini diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis yang lebih lengkap. Dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih efektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Bulog

Perusahaan Umum BULOG Pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967, kemudian diperbaharui terakhir dengan Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001, sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPDN). BULOG berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 Pasal 40, BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 20 Januari 2003, LPND BULOG berubah statusnya menjadi perusahaan umum (PERUM). Bulog selanjutnya disebut Perum Bulog. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pendirian Perusahaan umum Bulog dan peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2003 pasal 70 dan pasal 71.

Selain itu berdasarkan Instruksi Presiden (InPres) Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 2 Maret 2005 tentang kebijakan Perberasan Nasional

dalam Instruksi Nomor 46 disebutkan bahwa pelaksanaan pembelian gabah oleh pemerintah secara nasional dilakukan oleh Perum Bulog.

Saat ini Perum Bulog Subdivre VII Makassar dipimpin oleh Murniaty Kamase selaku Kepala Bulog Subdivre VII Makassar dan Fandi Kurniawan selaku wakil kepala Subdivre VII Makassar, yang mempunyai wilayah kerja terdiri dari Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

2. Visi dan Misi Badan Urusan Logistik

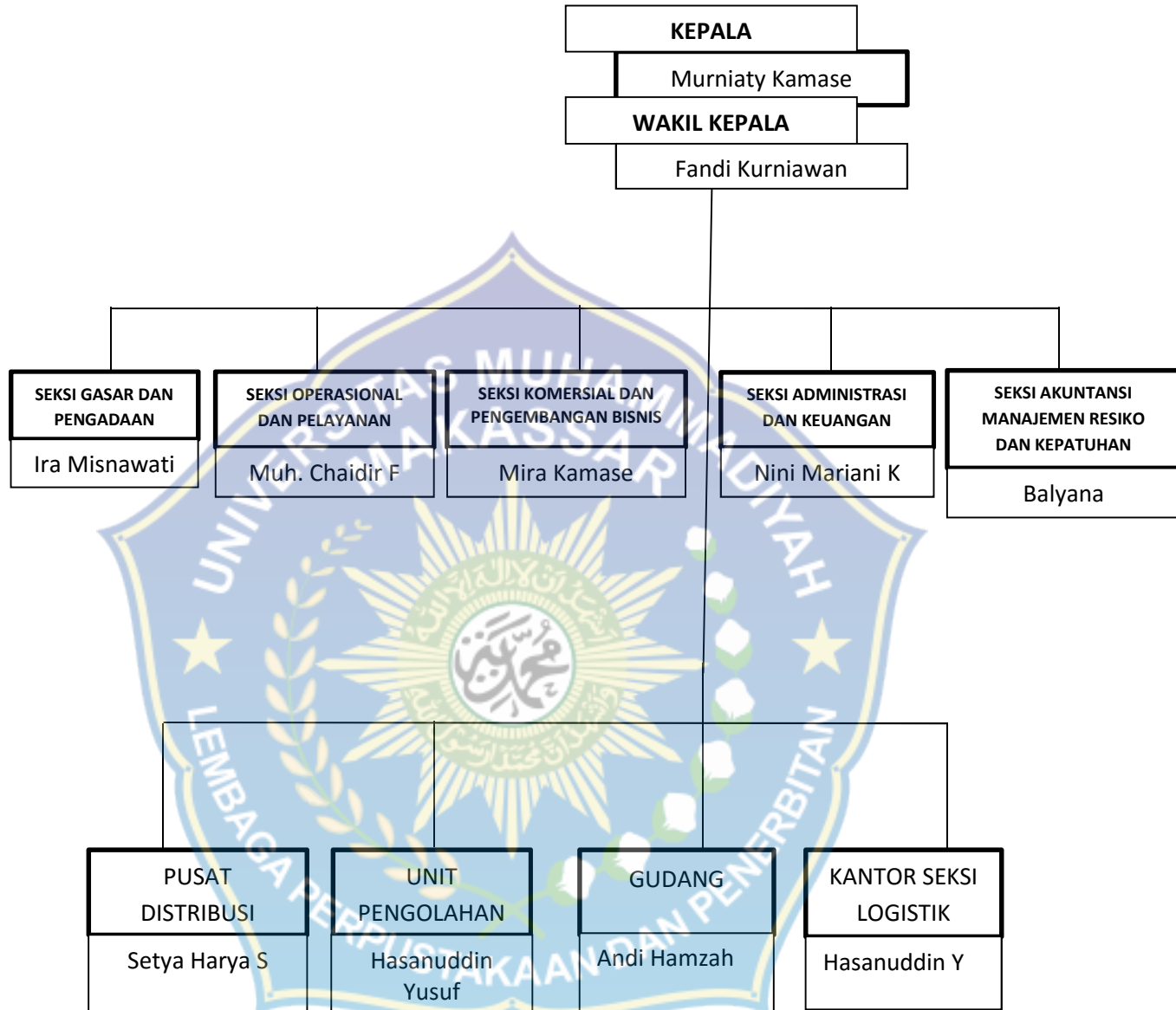
a. VISI

“Menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan”.

b. MISI

1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang professional, teknologi yang terdepan dan system yang terintegrasi
3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan
4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.

3. Struktur organisasi



4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Badan Urusan Logistik Subdivre VII Kota Makasar, adalah sebagai berikut:

a. Kepala Subdivisi Regional

Kepala Subdivisi Regional adalah unsur pimpinan yang bertanggung jawab langsung terhadap semua kegiatan Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional.

Kepala Subdivisi Regional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengadaan, operasional dan pelayanan public, komersial dan pengembangan bisnis, pengelolaan administrasi dan keuangan, akuntansi serta manajemen resiko dan kepatuhan, serta melaksanakan koordinasi dengan wakil Subdivisi Regional.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subdivisi Regional mempunyai fungsi, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan:

1. Pengadaan gabah, beras dan pangan pokok lainnya
2. Operasional dan tugas pelayanan public
3. Usaha komersial dan pengembangan bisnis
4. Pengelolaan keuangan
5. Pengelolaan SDM dan Umum
6. Pembinaan Kansilog, Pusat distribusi dan unit pengolahan.

b. Wakil Subdivisi Regional

Wakil Subdivisi Regional, adalah unsur pimpinan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Subdivisi Regional.

Wakil Subdivisi Regional mempunyai tugas pokok:

1. Membantu kepala Subdivisi Regional dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mengelola fungsi administrasi dan keuangan, akuntansi serta manajemen resiko dan kepatuhan
3. Mewakili kepala Subdivisi Regional apabila berhalangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Wakil Subdivisi Regional mempunyai fungsi membantu Kepala Subdivisi Regional dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan:

- a. Analisis harga dan pasar
- b. Pengadaan gabah, beras dan pangan pokok lainnya
- c. Operasional dan tugas pelayanan public
- d. Usaha bisnis komersial dan pengembangan bisnis.
- e. Pengelolaan keuangan,
- f. Pengelolaan SDM dan Umum.

c. Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan

Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan mempunyai tugas pokok melakukan pengamatan dan mengumpulkan data harga gabah, beras,

dan pangan pokok lainnya serta melakukan *market intelligence*, penyiapan data permintaan dan pasokan komoditas, perencanaan penyaluran, penyediaan data statistic, seleksi dan evaluasi mitra kerja pengadaan gabah/beras dan pangan pokok lain, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan gabah/beras PSO dan komersial serta pangan pokok lain meliputi sereal (jagung dan kedelai), hasil industri (gula, minyak goreng, dan tepung terigu), dan hortikultura dan pangan lain (bawang, cabe, daging sapi, daging ayam, telur ayam dan lainnya). Penghitungan kebutuhan yang meliputi bahan pendukung (karung pembungkus, benang kuralon dan lainnya), L/C pengadaan, biaya eksplotasi, penyiapan administrasi pengadaan, serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengadaan gabah, beras, dan pangan pokok lainnya.

d. Kepala Seksi Operasional dan Pelayanan Publik

Kepala Seksi Operasional dan Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan pergudangan, penyiapan sarana dan prasarana, pengolahan gabah, beras, dan pangan pokok lainnya. Administrasi dan operasional persediaan, perawatan, pengendalian mutu dan angkutan, administrasi operasional penyaluran beras kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, kelembagaan pemerintah, dan CPP, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan operasional dan pelayanan publik.

e. Kepala Seksi Komersial dan Pengembangan Bisnis

Kepala Seksi Komersial dan Pengembangan Bisnis mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan dan pengendalian, operasi penjualan distributor, penjualan langsung, pengiriman dan pengendalian produk di/dari pusat distribusi (*distribution center*) serta pengendalian distribusi produk kepada pelanggan penjualan industry dan wholesale, pelanggan penjualan langsung dan outlet binaan, pengembangan bisnis dan industri hilir (rumah pangan dan produk jual), administrasi biaya operasional dan hasil penjualan produk serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan komersial dan pengembangan bisnis.

f. Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan

Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan data Sumber Daya Manusia, administrasi dan verifikasi seluruh proses penerimaan dan pengeluaran transaksi keuangan baik untuk kegiatan operasional maupun komersial, pengelolaan surat menyurat, arsip dan perjalanan dinas, pengelolaan kerumatanngaan, pemeliharaan sarana dan prasarana (bangunan, kendaraan dan sarana lainnya).

Mengajukan usulan pengadaan sarana penyimpanan, sarana kantor, sarana lainnya, dan Replacement and Rehab (RR), inventarisasi dan administrasi asset tetap serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi dan keuangan.

g. Kepala Seksi Akuntansi, Manajemen Resiko dan Kepatuhan.

Kepala Seksi Akuntansi, Manajemen Resiko dan Kepatuhan mempunyai tugas pokok melakukan pencatatan, pengecekan, pengoreksian dan pengarsipan seluruh transaksi keuangan dan buku tambahan terhadap akun/koding uang muka, piutang, asset tetap, hutang dan lainnya. Pengecekan dan penghitungan dan pemungutan, penyetoran, pelaporan dan penyimpanan dokumen PPN, PPh, dan pajak lainnya. Penyusunan laporan keuangan subdivide, penerapan manajemen resiko dan kepatuhan di Subdivide, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan akuntansi, manajemen resiko dan kepatuhan.

B. Pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam bidang Manajemen Logistik

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang Pengadaan

Ketersediaan pasokan pangan nasional merupakan tugas utama Bulog dalam pelaksanaan pilar ketersediaan ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan akan pangan nasional dan masyarakat. Sehingga diperlukan intervensi Bulog dalam mengawal dan menjamin ketersediaan stok pangan nasional melalui sistem pengadaan pangan dapat terwujud.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Pemerintah menetapkan pengadaan barang

dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya diawali dengan identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima.

Pengadaan pangan adalah kegiatan penyediaan yang dilakukan oleh Bulog agar dapat berjalan dengan lancar tanpa terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan atau pasokan kebutuhan masyarakat akan pangan.

Kebutuhan persediaan pangan khususnya beras dan komoditas lainnya untuk wilayah kerja Bulog Makassar dan sekitarnya semakin meningkat dari hari kehari. Hal ini di sebabkan karena penambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat yang berpengaruh terhadap kebutuhan akan bahan pokok makanan seperti beras dan komoditi lainnya. Hal ini mengharuskan Bulog Subdivre VII melakukan perencanaan yang matang berdasarkan tingkat kebutuhan dan sekaligus melaksanakan kegiatan pengadaan gabah/beras.

Untuk mengetahui pengadaan logistik pada Bulog Subdivisi Regional Kota Makassar, Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Subdivisi Regional sebagai berikut:

”untuk Bulog Subdivisi Regional VII sudah melakukan pengadaan beras dan bahan pokok lainnya sesuai dengan target yang telah direncanakan awal berdasarkan tingkat kebutuhan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan kualitas” (Hasil wawancara FK, 25 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa pengadaan beras dan bahan pokok lainnya dilakukan melalui proses perencanaan yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan untuk memenuhi pelaksanaan program pemerintah seperti bantuan sosial masyarakat sejahtera (Bansos Rastra) dengan Beras Raskin (Raskin).

Disamping penjelasan yang telah dikemukakan di atas, berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan sebagai berikut:

” Pengadaan dan penyediaan stok pangan terutama beras dilakukan melalui Mitra Kerja Pengadaan (MKP), usaha dagang dan juga pengadaan bisa dilakukan oleh Satker (satuan kerja) yang dibentuk dari pegawai Bulog Subdivre VII yang ditetapkan melalui surat perintah Satker pengadaan dengan tetap memperhatikan kualitas dengan harga yang terjangkau”. (Hasil wawancara IM, 25 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dikemukakan bahwa proses pengadaan dan penyediaan stok pangan khusus beras dalam rangka memenuhi kebutuhan dan ketersediaan beras dalam wilayah kota Makassar dan daerah yang termasuk dalam wilayah Bulog subdevre VII seperti Maros, Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Gowa dan Takalar terutama tersedianya stok dipasaran dan untuk kebutuhan pemerintah dalam rangka bantuan Beras Miskin (Raskin) dapat

terpenuhi, mengingat beras ini menjadi makanan pokok dan kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Weele. Menurut Weele (2010: 25), mengemukakan bahwa pengadaan adalah perolehan barang atau jasa yang dibeli berdasarkan biaya yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi.

Kemudian lebih tegas juga dikemukakan oleh Cristopher dan Schooner (2007: 34), mengemukakan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan/organisasi di lihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pendistribusian (pengiriman) dan harga yang terjangkau.

Pengadaan dan penyediaan stok pangan terutama beras pada Bulog subdevre VII dilakukan melalui Mitra Kerja Pengadaan (MKP), usaha dagang dan terkadang pengadaan juga dilakukan oleh Satker (satuan kerja) yang dibentuk dari pegawai Bulog Subdivre VII Makassar yang ditetapkan melalui surat perintah Satker pengadaan. Pengadaan melalui Satker dan Mitra kerja Pengadaan dilakukan dengan memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bulog, dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberadaan lembaga yang di tunjuk.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional dan Pelayanan Publik, sebagai berikut:

” iya, untuk pengadaan pangan pada Subdivre VII, Alhamdulillah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ada, yaitu biasanya pengadaan dilaksanakan 2 kali dalam setahun, biasanya 3 bulan di awal yaitu di bulan maret-mei dan di panen ke 2 itu dilaksanakan pada bulan juli-september, dan sistem pengadaanya dilakukan oleh Mitra Kerja pengadaan (MKP) atau melalui Satker yang kita bentuk secara internal”. (Hasil wawancara MCF, 25 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa seluruh kegiatan pengadaan yang dilaksanakan pada Bulog di dasarkan pada proses perencanaan, itu dilakukan dua kali setiap tahunnya, yaitu untuk pengadaan tahap pertama dilaksanakan antara bulan maret, april dan mei dan yang kedua dilaksanakan antara bulan juli, agustus, dan September. Kedua tahapan ini di pengaruhi saat musim panen tiba yang dilakukan oleh petani.

Kemudian hasil wawancara dengan staf Perawatan Kualitas pada Subdivre, sebagai berikut:

” selama ini stok pengadaan pangan untuk Bulog Subdivre VII sudah berjalan dengan baik dan penyediaan pangan terutama beras itu sudah cukup, hal ini karena kami memiliki mitra kerja pengadaan dan satker untuk mendukung pengadaan yang tidak melalui mitra kerja yang ada. Mitra kerja pengadaan itu biasanya disesuaikan daerahnya seperti sektor Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar dengan tetap memperhatikan faktor kualitasnya”. (Hasil wawancara SE, 11 Juni 2019).

Proses pengadaan beras dan komoditi lainnya pada subdevre VII Makassar telah dilakukan berdasarkan aturan yang telah di buat berdasarkan kondisi kebutuhan setiap tahunnya ditambah persediaan stok untuk keadaan dan kondisi tertentu yang berfungsi sebagai cadangan. Namun satu hal yang tetap menjadi perhatian bagi Bulog adalah kualitas beras yang ada. Setiap Mitra kerja pengadaan dituntut untuk tetap menjaga kualitas beras dan komoditi lainnya seperti: jagung, gula, cabe, bawang, daging sapi, daging ayam dan lain-lain, agar jaminan atas produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar untuk dikonsumsi oleh masyarakat serta memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan keterbukaan serta transparan.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan Budiharjo dan Hayie Muhammad (2008: 23), pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional yaitu efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminatif dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi logistik dalam bidang pengadaan pada Badan Urusan Logistik sub devisi regional VII sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat bahwa proses pengadaan bahan pangan khususnya beras dan komoditi pangan lainnya sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat

sebelumnya. Disamping itu juga mengacuh pada tingkat kebutuhan masyarakat dan berdasarkan kebijakan dan program pemerintah untuk memberikan bantuan bahan pokok khususnya beras kepada masyarakat miskin (Raskin) melalui bantuan sosial. Disamping itu, pengadaan logistik khususnya ketersediaan stok pangan beras tetap mengacuh pada standar kualitas yang telah di tentukan.

2. Pelaksanaan Fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang Distribusi

Distribusi adalah kegiatan berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian bahan pangan khususnya beras dan komoditi pangan lainnya dari pemerintah melalui kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divre VII pada konsumen atau masyarakat sehingga penggunaannya sesuai yang diperlukan baik jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan.

Pelaksanaan distribusi bahan pangan yang dilakukan oleh Bulog diharapkan bisa sampai kepada tujuan sesuai dengan penugasan pemerintah baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pasar maupun melalui program pemerintah yaitu berupa pemberian bantuan sosial beras miskin kepada kelompok masyarakat miskin, operasi pasar dan kegiatan lainnya.

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Bulog dalam bidang distribusi, berikut ini akan dikemukakan hasil wawancara dengan staf Operasional dan Pelayanan Publik, sebagai berikut:

” pelaksanaan distribusi itu dilakukan sesuai dengan penugasan pemerintah atau berdasarkan distribusi penyebaran stok beras atau komoditi pangan lainnya dan itu sudah dilakukan secara merata sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan untuk subdivre VII proses distribusinya dilakukan ke Maros, Pangkep, Gowa, Takalar dan Makassar sendiri.” (Hasil wawancara AA, 11 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan tersebut diatas, memberikan gambaran bahwa distribusi yang dilakukan oleh Bulog Subdivre VII berdasarkan tingkat kebutuhan dari wilayah maupun pasar tradisional yang ada dikota Makassar dan kota lainnya yang ada dalam wilayah kerja Bulog Subdivre VII. Di samping itu Bulog juga mendistribusi beras dan komoditi pangan lainnya berdasarkan penugasan khusus dari pemerintah baik secara langsung oleh Bulog maupun melalui kementerian/departemen dan lembaga lainnya.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan, sebagai berikut:

” proses distribusi kebutuhan pangan dan komoditas lainnya untuk wilayah kerja kami itu sudah berjalan dengan efektif dan merata, sesuai tingkat kebutuhan melalui Mitra Kerja yang ada dan Satker yang sudah dibentuk serta berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) .”(Hasil wawancara IM, 25 Juni 2019)

Pelaksanaan pendistribusian kebutuhan pangan dan komoditi pangan lainnya dilakukan melalui kerjasama antara Bulog dan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) yang telah mendapatkan surat perintah distribusi berdasarkan wilayah kerja masing-masing. Wilayah kerja untuk MKP Bulog Subdivre VII mendistribusi kebutuhan pangan, khususx beras dan komoditi pangan lainnya ditentukan oleh Bulog berdasarkan daerah terdekat yang mudah dijangkau dan cepat proses pendistribusian secara efektif serta berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya .

Hal ini kemudian sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soekartawi. Menurut Soekartawi (2002: 77), mengemukakan bahwa distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai hingga konsumen akhir. Pengiriman dan penyaluran yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam organisasi/lembaga.

Hal senada juga dipertegas berdasarkan hasil wawancara oleh Wakil Kepala Subdivisi Regional, sebagai berikut:

” untuk pelaksanaan distribusi pangan dan komoditas pangan lainnya (Jagung, gula, cabe, bawang, daging sapi, daging ayam dan lain-lain) itu dilakukan sesuai dengan penugasan pemerintah atau berdasarkan distribusi penyebaran stok beras atau komoditi pangan lainnya sudah terdistribusi secara merata sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan untuk subdivre VII proses distribusinya dilakukan ke Maros, Pangkep, Gowa, Takalar dan

Makassar sebagai wilayah kerja kami”. (Hasil wawancara FK, 25 Juni 2019)

Disamping hasil wawancara yang dikemukakan oleh Wakil Kepala Subdivisi Regional VII, maka berikut ini dikemukakan hasil wawancara informan dari pedagang pasar tradisional yang ada dikota Makassar. Hasil wawancara dengan Pedagang Pasar Hertasning Jalan Hertasning, sebagai berikut:

” kami selalu mendapatkan beras dari Mitra Kerja Bulog untuk kami jual dipasar ini, dan untuk mendapatkan beras untuk dijual itu tidak susah karena mereka datang sesuai dengan waktunya (ditentukan), kecuali kalau banyak pembeli dan stok kurang maka kami yang meminta untuk segera dibawakan”. (Hasil wawancara UA, 29 Juni 2019)

Dari hasil wawancara tersebut, di jelaskan bahwa proses pelaksanaan pendistribusian pangan khususnya beras dan komoditi pangan lainnya antara lain: Jagung, gula, cabe, bawang, daging sapi, daging ayam dan lain-lain, selaku pedagang tidak mengalami kesulitan karena Bulog melalui mitra kerjanya setiap saat melakukan kros cek kepasar khususnya pedagang terkait tersedianya stok pangan yang di jual pada waktu yang tepat.

Pelaksanaan pendistribusian pangan harus bisa sampai kepada konsumen tepat waktu terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Assauri (2004: 12) mengemukakan bahwa distribusi adalah kegiatan memindahkan produk dari sumber kekonsumen akhir dengan saluran

distribusi pada waktu yang tepat. Kegiatan ini dibutuhkan kemampuan dan keahlian yang cukup agar bisa tepat waktu dan tepat sasaran.

Selain itu, pihak Bulog melalui kemitraan yang ada, selalu menghubungi pedagang yang ada di pasar untuk tetap menjamin ketersediaan pangan yang ingin di jual agar tidak terjadi kelangkaan dan melonjaknya harga di pasaran dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektifitas serta transparansi.

Berikut ini akan dikemukakan hasil wawancara dengan Pedagang lainnya, yaitu pedagang Pasar Pa'baeng-baeng yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, sebagai berikut:

“Alhamdulillah selaku penjual, kami selalu mendapatkan beras dari Mitra Kerja Bulog yang ada di Makassar ini, untuk kami jual dipasar, dan untuk mendapatkan stok beras untuk dijual alhamdulillah itu tidak susah kami dapatkan karena Perusahaan itu selalu datang sesuai dengan perjanjian berdasarkan laku tidaknya beras yang dijual, kecuali pada musim-musim banyak pembeli dan stok kurang maka biasanya kami yang meminta diantarkan”. (Hasil wawancara HW, 11 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, pelaksanaan pendistribusian kebutuhan akan stok pangan dan komoditi pangan lainnya khususnya di pasar-pasar tradisional dikota Makassar itu sudah dilaksanakan oleh Bulog baik melalui Mitra Kerja Pengadaan maupun dilakukan langsung oleh Bulog melalui Satker yang dibentuk. Pendistribusian yang dilakukan tidak saja di dasarkan pada kebutuhan penjualan semata pedagang di pasar tetapi yang lebih utama adalah

bagaimana stok pangan dan komoditi pangan lainnya seperti: Jagung, gula, cabe, bawang, daging sapi, daging ayam dan lain-lain dapat tersedia dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mudah dan dapat terjangkau.

Wawancara juga dilakukan terhadap pedagang pasar setral Sunggu Minasa Gowa. Berikut ini akan dikemukakan hasil wawancara, sebagai berikut:

“bagi kami selaku pedagang beras dan bahan pokok lainnya, selalu mendapatkan beras dari Mitra Kerja Bulog yang ada di Gowa ini, untuk kami jual dipasar, dan bagi kami untuk mendapatkan beras untuk dijual tidak susah kami dapatkan karena Perusahaan itu selalu datang setiap saat, kecuali pada musim banyak pembeli terutama pada hari-hari raya tertentu seperti Idul Fitri dan Idul adha ”. (Hasil wawancara DS, 11 Juni 2019).

Kemudian lebih lanjut di kemukakan oleh pedagang yang ada di Pasar Terong Makassar, berikut hasil wawancara dengan Pedagang Pasar Terong yang terletak di Jalan Bawakaraeng kota Makassar, sebagai berikut:

” untuk menjual beras dan cabe serta bahan pokok lainnya kami tidak mengalami kesulitan karena setiap saat ada yang bawakan yang penting kita masuk dan terdaftar sebagai pedagang yang menjual beras dan lainnya, ami biasanya kekurangan stok kalau lagi persiapan puasa, lebaran itu biasanya banyak pembeli tetapi itu bisa diatasi karena tinggal meminta saja”. (Hasil wawancara ID, 11 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan, baik pada kantor Bulog Subdivre VII Makassar ataupun melalui Pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional kota Makassar, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Bulog dalam bidang pendistribusian sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dapat di kemukakan bahwa pelaksanaan pendistribusian kebutuhan pangan khususnya beras dan komoditi pangan lainnya seperti: jagung, gula, cabe, bawang, daging sapi, daging ayam dan lain-lain sudah tersedia di pasar-pasar tradisional di mana masyarakat pada umumnya mendapatkan kebutuhan tersebut. Pelaksanaan pendistribusian bahan pangan tersebut dilakukan oleh Bulog melalui Satker yang dibentuk berdasarkan surat penugasan dan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) baik dalam bentuk Perusahaan maupun dalam bentuk usaha perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk di dalamnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pendistribusian.

3. Pelaksanaan Fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang Pengendalian (Pengawasan)

Pengendalian (Pengawasan) adalah suatu fungsi manajemen yang sangat urgen yang terkait dengan proses pengaturan berbagai faktor agar kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan melakukan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan seluruh proses mulai dari pengadaan dan penyediaan stok kebutuhan pangan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan kepada perusahaan umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Penugasan untuk menjaga ketahanan pangan nasional maka, secara struktur kelembagaan mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah atau sub regional diharuskan melakukan langkah-langkah strategis demi tercapainya tugas tersebut yang telah diamanahkan. Termasuk di dalamnya Bulog Subdivre VII kota Makassar dituntut untuk melakukan dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Bulog subdivre VII dalam melakukan pengadaan dan pendistribusian pangan dan komoditi lainnya agar lebih efektif dan efisien pelaksanaannya maka diperlukan pula adanya sistem pengawasan yang efektif, sehingga pencapaian sasaran dapat terpenuhi. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang pengendalian atau pengawasan, maka berikut ini akan dikemukakan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Bulog Subdivisi Regional VII, sebagai berikut:

“ proses pengendalian dan pengawasan pada seluruh kegiatan Bulog Subdivre VII ini diawasi oleh Dewan Asisten Pengawas

(Aswas) dan ada juga secara internal yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI). Dewan asisten pengawas ini membawahi semua pengawas dalam rangka mengendalikan ketersediaan stok beras untuk wilayah kerja Subdivre VII yang meliputi, Makassar, Maros, Pangkep, Gowa dan Takalar guna memantau dan mengendalikan serta melakukan kontrol agar semua aktifitas dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. ”. (Hasil wawancara FK, 25 Juni 2019)

Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh salah seorang staf Perawatan Kualitas Bulog Subdivre VII tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan dan pendistribusian stok pangan nasional khususnya di wilayah Regional VII. Berikut hasil wawancara dengan staf Perawatan Kualitas Bulog Subdivre VII, sebagai berikut:

“ pengawasan dan pengendalian terkait pengadaan seperti jenis barang, kualitas barang, volume barang sampai tiba di gudang penyimpanan dan akhirnya dikeluarkan untuk didistribusi sampai kepada pedagang di awasi oleh dewan Asisten Pengawas ”. (Hasil wawancara SE, 11 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka pelaksanaan pengendalian (Pengawasan) atas kegiatan pengadaan dan distribusi dilakukan oleh lembaga yang disebut dewan asisten pengawas dan satuan pengawas internal. Pengawasan yang dilakukan guna memantau dan mengendalikan agar semua aktifitas dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Jones and George (2003:331) memberikan gambaran tentang pengertian pengendalian (Controlling) adalah proses dimana para pimpinan

(manajer), atau CEO dalam organisasi melakukan pemantauan dan pengaturan bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan atau aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Disamping itu, Berikut ini akan di kemukakan hasil wawancara dengan staf Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Subdivre VII sebagai berikut:

“ untuk pengendalian dan pengawasan terkait pengadaan dan pendistribusian dilakukan oleh badan Pengawas terutama menyangkut kualitas barang, jenis barang, volume barang di gudang penyimpanan dan didistribusi termasuk pengawasan kepada pedagang ”. (Hasil wawancara AA, 11 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilakukan mulai dari proses pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tetap menjaga agar semua berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan Manullang (2004: 173), mengemukakan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, memberi penilaian dan mengecek bila perlu dengan tujuan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang di rencanakan.

Kemudian berikut ini akan dikemukakan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan Bulog Subdivre VII, sebagai berikut:

“ iya... semua kegiatan yang dilakukan oleh Satker dan Mitra kerja Pengadaan dan pendistribusian itu diawasi dan di kendalikan khusus oleh dewan Asisten Pengawas yang bertugas untuk menjamin ketersediaan bahan pangan seperti beras dan komoditi pangan lainnya seperti: Jagung, gula, cabe, bawang, daging sapi, daging ayam dan lain-lain, terutama menyangkut: jenis barang, kualitas barang, volume barang dan menjamin ketersediaan di pasaran dengan harga yang terjangkau (murah) dan mudah di peroleh oleh masyarakat ”. (Hasil wawancara IM, 25 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dikemukakan bahwa proses pengawasan terhadap semua aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Satker dan Mitra kerja Pengadaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga Bulog Subdivre VII dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi bila ditemukan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Robbins dan Coulter. Menurut Robbins dan Coulter (2005: 211), mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan aktivitas organisasi untuk menentukan apakah aktivitas sesuai dengan yang direncanakan dan sebagai proses memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi.

Lebih lanjut, peneliti juga melakukan wawancara kepada staf seksi Gasar dan pengadaan tentang pelaksanaan pengawasan pada

proses pengadaan dan pendistribusian pangan dan komoditi lainnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan hasil wawancara dengan Staf Seksi Gasar dan Pengadaan Bulog Subdivre VII, sebagai berikut:

“ pengawasan dan pengendalian pada Bulog Subdivre VII dilakukan oleh Aswas (Dewan Asisten Pengawas) dan Satuan Pengawas Intern (SPI) dengan tujuan mengawasi pengadaan seperti jenis barang, kualitas barang, jumlah/banyaknya barang sampai tiba di gudang penyimpanan dan akhirnya dikeluarkan untuk didistribusi kepada pedagang dalam wilayah kerja Bulog Subdivre VII Makassar ”. (Hasil wawancara MAP, 25 Juni 2019)

Dalam rangka memperjelas pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh dewan asisten pengawas dan pengawas internal yang dibentuk oleh Bulog subdivre VII Makassar, maka berikut ini akan dikemukakan pula hasil wawancara yang dilakukan kepada pedagang pasar tradisional pada beberapa pasar di kota Makassar, terutama dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan dasar seperti beras dan komoditi pangan lainnya serta ketersediaanya di pasaran.

Berikut ini akan dikemukakan hasil wawancara dengan Pedagang Pasar Pa’baeng-baeng jalan Sultan Alauddin, sebagai berikut:

“ disini kami diawasi oleh pengawas dari Bulog Subdivre VII Makassar dalam menjual beras dan komoditi pangan lainnya seperti jagung, cabe dan lainnya, para pengawas itu selalu bertanya tentang berapa harganya, bagaimana kualitas barang jualannya dan apa sudah terjual atau belum”. (Hasil wawancara HW, 11 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa semua aktifitas penjualan terhadap bahan pokok terutama beras yang dilaksanakan oleh para pedagang diawasi oleh Bulog Subdivre VII Makassar seperti pengawasan terhadap harga standar, menyangkut kualitas barang serta ketersediaan stok di pasaran.

Lebih lanjut juga dikemukakan hasil wawancara dengan Pedagang Pasar Hertasning Jalan Hertasning Raya, sebagai berikut:

“ Sebagai pedagang kami selalu di datangi pegawai dari Bulog Subdivre VII Makassar dan pengawas itu selalu bertanya kepada kami bagaimana kualitas beras yang di jual dan kami bilang bagusji, apakah persediaan cukup atau tidak selalu kami jawab cukup karena memang selalu tersedia dan dalam mendapatkan stok beras selalu terlambat datang dari gudang bulog atau lancer, kami jawab semua lancar”. (Hasil wawancara UA, 29 Juni 2019)

Kemudian untuk mempertegas kedua pernyataan pedagang melalui hasil wawancara tersebut diatas, maka peneliti juga melakukan wawancara yang sama kepada salah satu pedagang yang ada di pasar tradisional Terong. Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan Pedagang Pasar Terong, sebagai berikut:

“ betul...di sini kami di awasi oleh pegawai dari Bulog, terutama kualitas barang khususnya beras dan jagung, cabe yang kami jual, termasuk ketersediaan stoknya setiap saat. Dan menyangkut harganya yang harus terjangkau oleh masyarakat. Kami tidak boleh menaikkan harga seenaknya karena kami di tegur dan bisa dikeluarkan dari kelompok dan tidak bisa menjual lagi beras dan yang lainnya dari Bulog”. (Hasil wawancara ID, 11 Juni 2019).

Kemudian lebih lanjut juga dikemukakan hasil wawancara dengan masyarakat pembeli di Pasar Hertasning Jalan Hertasning Raya, sebagai berikut:

“ Alhamdulillah sebagai masyarakat, kami selalu mendapatkan bahan pangan khususnya beras dengan mudah dan harga yang terjangkau, selama kami belanja bahan pokok dipasar ini harganya selalu stabil tidak pernah kami mendapatkan harga yang mahal ”. (Hasil wawancara AA, 29 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan, baik pada kantor Bulog Subdivre VII Makasar ataupun melalui masyarakat dan pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional kota Makassar, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Bulog dalam bidang pengendalian/pengawasan sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dapat di kemukakan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan dan pendistribusian akan kebutuhan stok pangan dan komoditi pangan lainnya seperti: jagung, gula, cabe, bawang, daging sapi, daging ayam dan lain-lain sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Bulog subdivre VII baik pada proses pengadaan persediaan stok digudang-gudang maupun pada proses pendistribusian kepada masyarakat melalui program bantuan pemerintah dalam hal ini bansos maupun ketersediaan di pasar-pasar tradisional di mana masyarakat pada umumnya mendapatkan kebutuhan tersebut.

4. Pelaksanaan Fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang Usaha Jasa Logistik

Salah satu kegiatan yang mendukung serta mendorong pengembangan Bulog subdivre VII Makassar dalam menyediakan stok pangan nasional khususnya dalam wilayah kerja Subdivre VII Makassar, yang meliputi Makassar, Maros, Pangkajene Kepulauan, Gowa dan Takalar adalah usaha jasa logistik lainnya.

Kegiatan usaha jasa logistik, dilakukan dalam rangka keikutsertaan Bulog untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dalam bidang transportasi angkutan barang serta usaha lainnya di bidang pengembangan dan peningkatan hasil produksi pertanian masyarakat.

Berikut ini dikemukakan beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pimpinan dan pegawai yang ada pada Bulog subdivre VII Makassar, terkait kegiatan usaha yang dilakukan dalam bidang jasa logistik. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional dan Pelayanan Publik, dikemukakan sebagai berikut:

“ ada beberapa usaha jasa logistik yang dikembangkan oleh Bulog Subdivre VII yaitu UB. Jastasma yang bergerak dibidang usaha pemberantasan hama dan perawatan komoditi pangan khususnya beras, dan usaha pengantaran barang keluar daerah (jasa pengangkutan)”. (Hasil wawancara MCF, 25 Juni 2019).

Lebih lanjut juga dikemukakan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan Bulog Subdivre VII, mengemukakan sebagai berikut:

“ Bulog Subdivre VII mengembangkan usaha jasa logistik yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dan perawatan komoditi pangan khususnya beras, melalui UB. Jastasma dan usaha jasa pengangkutan yaitu dengan melakukan usaha pengantaran barang keluar daerah ”. (Hasil wawancara IM, 25 Juni 2019)

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada staf yang lain dengan tujuan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh Bulog subdivre VII Makassar. Berikut ini akan dikemukakan hasil wawancara dengan Staf Seksi Gasar dan Pengadaan Bulog Subdivre VII, sebagai berikut:

“ yaa...disamping fokus pada penyediaan stok pangan khususnya beras, Bulog Subdivre VII mengembangkan usaha jasa logistik yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dan perawatan komoditi pangan yaitu melalui UB. Jastasma dan usaha jasa pengangkutan yaitu dengan melakukan usaha pengantaran barang keluar daerah dan PT. Jasa Prima Logistik, serta melakukan penjualan secara komersial seperti, gula, minyak kelapa, teigu dan lain-lain dan usaha jasa logistik bentuk Bulog ini bekerja berdasarkan SOP yang telah ditetapkan”. (Hasil wawancara MAP, 25 Juni 2019)

Hasil wawancara juga di pertegas oleh staf Bulog lainnya. Yaitu hasil wawancara dengan staf Perawatan Kualitas Bulog Subdivre VII mengemukakan sebagai berikut:

“ sebetulnya banyak usaha-usaha jasa logistik yang di lakukan oleh Bulog secara nasional terutama dalam memenuhi kebutuhan 9 bahan pokok masyarakat di Indonesia, tetapi khusus Bulog subdivre VII makassar ini melakukan usaha logistik yaitu PT. Jasa Prima Logistik, UB. Jastasma yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dan perawatan komoditi pangan serta

usaha jasa pengangkutan yaitu dengan melakukan usaha pengantaran barang keluar daerah ”. (Hasil wawancara SE, 11 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan, pada kantor Bulog Subdivre VII Makassar, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bulog Subdivre VII Makassar dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam menyediakan stok pangan nasional juga melakukan usaha jasa logistik lain seperti membentuk UB. Jastama (Jasa pemberantasan hama), yang diperuntukkan bagi peningkatan produksi pertanian dan untuk mencegah terjangkitnya penyakit dan hama bagi pertumbuhan tanaman pertanian yang ada. Disamping itu pula ada usaha PT. Jasa Prima Logistik yang bergerak dibidang angkutan barang antar daerah dan antar propinsi serta usaha penjualan barang-barang komersial lainnya.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Urusan Logistik dalam Bidang Manajemen Logistik Subdivre VII Makassar

a. Faktor Pendukung

Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang manajemen logistik pada Subdivre VII Makassar adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia

Keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya salah satunya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, dalam hal ini pegawai atau aparturnya dalam organisasi tersebut. Sumber

daya manusia yang dimaksud disini berkaitan dengan kuantitas dalam jumlah yang cukup maupun kualitas berupa kemampuan pegawai Bulog dalam pelaksanaan fungsinya dalam bidang manajemen logistik. Kemampuan sumber daya yang dimiliki Bulog terdiri dari kemampuan untuk merencanakan pengadaan gabah, beras dan pangan pokok lainnya, kemampuan operasional dan tugas pelayanan publik dan sebagainya.

Berikut dikemukakan hasil wawancara kepada informan terkait ketersediaan sumber daya pegawai yang ada pada Bulog subdivre VII sebagai salah satu faktor yang mendukung dalam melaksanakan kegiatan dan program yang sudah menjadi tugas utama Bulog.

Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Subdivisi Regional, sebagai berikut:

“ kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bulog Subdivre VII Makassar pada umumnya sudah cukup memadai, hal ini karena secara formal mendidikan mereka rata-rata sarjana lengkap (S1) dan bahkan ada beberapa pimpinan sudah berpendidikan strata dua (S2) serta memiliki pengalaman dan masa kerja yang cukup lama”. (Hasil Wawancara FK, tanggal 25 Juni 2019)

Kemudian lebih lanjut dikemukakan hasil wawancara dengan staf Perawatan Kualitas, sebagai berikut:

“ SDM yang dimiliki oleh Subdivre VII Kota Makassar memiliki kemampuan memadai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, berdasarkan pengetahuan saya secara formal mendidikan pegawai baik unsur pimpinan maupun

pegawai rata-rata sarjana (S1) dan bahkan ada beberapa pimpinan sudah berpendidikan strata dua (S2) dan mereka sudah ber pengalaman dalam bekerja”. (Hasil Wawancara SE, tanggal 11 Juni 2019).

Lebih lanjut dikemukakan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan, sebagai berikut:

“ Alhamdulillah sumber daya pegawai yang dimiliki oleh Bulog Subdivre VII Makassar sudah memadai, baik keterampilan yang dimiliki, pengalaman kerja yang cukup dan secara formal mendidikan pegawai disini yaa... rata-rata sarjana lengkap (S1) dan bahkan ada beberapa pimpinan sudah berpendidikan strata dua (S2). Pegawai di sini harus memiliki kemampuan berbagai multi disiplin ilmu karena ruang lingkup pekerjaannya sangat luas ”. (Hasil wawancara IM, tanggal 25 Juni 2019)

Dari hasil wawancara tersebut diatas, menunjukkan bahwa Bulog Subdivre VII Makassar memiliki sumber daya pegawai yang cukup memadai dengan memiliki kualifikasi S1 dan S2. Kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya pegawai antara lain :

- a. Kemampuan dalam menyusun perencanaan pengadaan beras, gabah dan kebutuhan pangan pokok lainnya.
- b. Kemampuan operasional dan tugas khusus dalam pelayanan publik.
- c. Kemampuan dalam melakukan usaha komersial dan pengembangan bisnis
- d. Kemampuan manajerial dan pengelolaan keuangan
- e. Kemampuan dalam pengelolaan SDM dan umum

- f. Kemampuan dalam membina Kansilog, gudang, pusat distribusi dan unit pengolahan.

2. Pergudangan

Salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan usaha bagi Bulog Subdivre VII Makassar adalah tersediannya pergudangan sebagai tempat penyimpanan barang baik pada saat pengadaan maupun pada saat sebelum di distribusi. Kenyamanan dan keamanan dalam kegiatan usaha terutama dalam dunia bisnis sangat diperlukan termasuk didalamnya tempat atau lokasi yang strategis.

Keberhasilan Bulog dalam menjalankan misinya untuk menjaga stok pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat sangat di harapkan adanya gudang yang memadai, baik dalam jumlah kapasitas yang dapat ditampung maupun kemudahan akses untuk mencapainya. Termasuk di dalamnya pelaksanaan kegiatan bulog subdivre VII Makassar.

Berikut ini akan dikemukakan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Subdivisi Regional, sebagai berikut:

“ Salah yang mendukung kegiatan usaha Subdivre VII ini adalah tersedianya gudang yang dapat menampung stok gabah dan beras baik pada saat pengadaan pasca panen maupun setelah pengolahan untuk kemudian di distribusi dalam rangka penyediaan stok di pasaran maupun untuk Bantuan Sosial Rakyat Miskin (Bansos Raskin)”. (Hasil wawancara FK, tanggal 25 Juni 2019)

Kemudian hasil wawancara juga di kemukakan oleh staf Operasional dan Pelayanan publik Bulog subdivre VII, sebagai berikut:

“ bagi kami gudang merupakan faktor pendukung utama dalam melaksanakan misi untuk memberikan penyediaan layanan untuk pemenuhan pangan nasional terkhusus dalam wilayah kerja Subdivre 7 hal ini karena di samping tempat dan lokasinya strategis juga kami dapat dengan mudah mengawasinya baik pada saat menerima gabah maupun beras dari pihak Mitra kerja Pengadaan ataupun pada saat ingin disalurkan melalui program bantuan beras pemerintah kepada masyarakat miskin”. (Hasil wawancara AA, 11 Juni 2019)

Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada informan lainnya untuk mengetahui pentingnya kesiapan pergudangan yang dimiliki Bulog terutama dalam melakukan penyimpanan stok yang ada sebelum melakukan pendistribusian kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut hasil wawancara dengan staf Perawatan Kualitas, dikemukakan sebagai berikut:

“ yang mendukung kami dalam bekerja adalah tersedianya pergudangan yang cukup. gudang merupakan kebutuhan bagi kami dalam untuk menampung stok gabah yang mau di keringkan dan di pabrik kemudian beras untuk di distribusi disamping itu gudang yang dimiliki Subdivre VII semua bisa dijangkau dengan cepat dan mudah”. (Hasil wawancara SE, tanggal 11 Juni 2019).

Ketersedian tempat penampungan atau lebih dikenal dengan istilah Pergudangan bagi Bulog Subdivre VII Makassar adalah merupakan hal yang sangat penting karena gudang dijadikan sebagai

tempat penyimpanan baik sebelum maupun setelah dipabrik dari gabah menjadi beras yang siap untuk di distribusi.

Untuk lebih jelasnya berikut ini peneliti akan dikemukakan jumlah gudang dan wilayah kerjanya, sebagai berikut:

Tabel 3
Keadaan Pergudangan Bulog Subdivre VII Makassar
Tahun Anggaran 2018/2019

No.	Wilayah Kerja	Jumlah (Unit)	Kondisi Gudang
1.	Makassar	9 Unit	Aktif
2.	Maros	3 Unit	Aktif
3.	Pangkep	2 Unit	Aktif
4.	Gowa	3 Unit	Aktif
5.	Takalar	3 Unit	Aktif

Sumber data : Bagian Administrasi Bulog Subdivre VII Makassar

Disamping 20 unit pergudangan yang dimiliki Bulog Subdivre VII Makassar yang tersebar pada lima kabupaten kota tersebut diatas sebagai bagian dari wilayah kerja Bulog subdivre VII, maka Bulog juga memiliki dua gudang sebagai DC (*Distribution Centre*) yang terletak di Kota Makassar dan Maros.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang manajemen logistik khususnya pada Bulog subdivre VII Makassar ada dua yaitu kesiapan sumber daya aparatur (pegawai) yang memadai yang didukung oleh kemampuan yang dimiliki, pengalaman yang cukup serta tingkat pendidikan formal yang berkualifikasi strata satu (S1) dan strata dua

(S2), dan yang kedua adalah jumlah pergudangan cukup memadai yang didukung oleh kemudahan akses dan informasi ke lokasi pergudangan yang tersedia, serta tersebar di beberapa daerah khususnya dalam wilayah kerja Bulog Subdivre VII Makassar, yang meliputi Maros, Pangkajene kepulauan, gowa, takalar serta Makassar itu sendiri.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang manajemen logistik pada Subdivre VII Makasar adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Cuaca

Perubahan cuaca yang tidak menentu dan selalu berubah mengakibatkan gangguan terhadap kelangsung kegiatan usaha pengadaan dan pendistribusian serta kegiatan lainnya terutama pengembangan usaha di bidang pertanian yang produksi dan kualitasnya sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca.

Kondisi cuaca ini juga berpengaruh terhadap kinerja Bulog Subdivre VII dalam mengembangkan kegiatan usahanya terutama dalam proses pengadaan gabah, beras dan pengadaan pangan pokok lainnya serta berpengaruh pada operasionalisasi dan pelaksanaan tugas pelayanan publik. termasuk di dalamnya ketika musim panen petani telah tiba.

Berikut ini akan dikemukakan hasil wawancara kepada informan terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi Badan Urudan

logistik dalam bidang Manajemen Logistik Bulog subdivre VII Makassar. Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Subdivisi Regional, sebagai berikut:

“ kendala yang kami disini adalah adanya cuaca yang terkadang susah diprediksi, kenapa? Karena untuk mendapatkan kualitas beras yang bagus maka dibutuhkan pengeringan yang bagus dan itu melalui penyinaran matahari yang cukup. Terkadang kami harus melibatkan tenaga lepas untuk membantu proses pengeringan bila prediksi cuaca tidak jelas. Termasuk yang menjadi keluhan mitra kerja bulog itu adalah faktor cuaca”.
(Hasil wawancara FK, tanggal 25 Juni 2019)

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi dan kualitas beras yang dihasilkan oleh petani dan Bulog adalah faktor cuaca. Hal ini karena dalam proses pengeringan gabah membutuhkan penyinaran matahari yang cukup. Pengaruh cuaca yang tidak stabil juga berpengaruh terhadap perekrutan sejumlah tenaga lepas untuk membantu pekerja setiap saat yang dapat menambah beban Bulog.

Kemudian lebih lanjut, hasil wawancara juga dilakukan kepada Kepala Seksi Operasional dan Pelayanan Publik, dengan mengemukakan sebagai berikut:

“ salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan usaha yang dikembangkan oleh Subdivre VII adalah faktor cuaca, hal ini disebabkan karena gabah yang sudah dibeli kemudian di masukkan ke gudang lalu kemudian dikeringkan, untuk mendapatkan kualitas beras yang bagus maka dibutuhkan penyinaran matahari yang memadai, tetapi sekarang ini sangat

susah diprediksi cuaca karena mudah berubah dan menyulitkan para pekerja ”. (Hasil wawancara MCF, 25 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa faktor cuaca sangat menyulitkan para pekerja terutama pada saat proses pengeringan diluar gudang di lakukan. Disamping itu faktor cuaca juga susah diprediksi, sebentar cerah dan sebentar bisa berubah jadi hujan atau gelap.

Hal senada juga dikemukakan oleh informan yang lain, yaitu hasil wawancara dengan Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan, sebagai berikut:

“ kendala terbesar bagi kami adalah faktor cuaca, hal ini disebabkan karena gabah dan beras termasuk komoditas lainnya sangat dipengaruhi oleh cuaca, misalnya, untuk mendapatkan kualitas beras yang bagus maka dibutuhkan penyinaran matahari yang memadai, hal ini di sebabkan karena sekarang ini sangat susah diprediksi kadang terang dan kadang tiba-tiba hujan ”. (Hasil wawancara MAP, 25 Juni 2019)

2. Keterbatasan stok untuk komoditas tertentu

Faktor penghambat lainnya dalam mengembangkan pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang manajemen logistik pada Bulog Subdivre VII adalah ketersediaan stok yang kurang untuk komoditas tertentu.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara terhadap informan pada Bulog subdivre VII Makassar. Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Subdivisi Regional, sebagai berikut:

“ Kendala yang kami rasakan juga adalah terbatasnya persediaan stok komoditas tertentu terutama minyak goreng, gula pasir, cabe. Hal ini disebabkan karena untuk stok ini pengadaannya dilakukan di tingkat pusat karena untuk di wilayah Sulawesi Selatan ini sangat terbatas . komoditas ini terbatas dengan kita beli lalu dijual kembali tapi untuk disimpang sebagai cadangan itu tidak tersedia”. (Hasil wawancara, FK 25 Juni 2019)

Kemudian lebih lanjut wawancara juga dilakukan pada bagian pengadaan gabah, beras dan pangan pokok lainnya. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Gasar dan Pengadaan, dikemukakan sebagai berikut:

“ kami kekurangan stok persediaan untuk komoditas tertentu seperti cabe, gula pasir dan minyak goreng, daging sapi dan lainnya, kesemuanya ini pengadaannya sangat terbatas, sehingga terkadang terjadi kelangkaan di pasaran dan harganya melonjak tinggi.” (Hasil wawancara IM, 25 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dijelaskan bahwa Bulog kekurangan stok persediaan untuk komoditi tertentu seperti cabe, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam dan telur. Semua kebutuhan tersebut proses pengadaannya sangat terbatas karena berasal dari luar wilayah bulog, sehingga sering terjadi kelangkaan.

Pelaksanaan program penyediaan dan terpenuhinya kebutuhan pangan nasional oleh pemerintah terutama dalam pelaksanaan tugas Bulog berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 khusus Bulog subdivre VII Makassar terdapat dua kendala utama, yaitu faktor cuaca yang terkadang susah diprediksi dan faktor keterbatasan stok

komoditi tertentu, terutama komoditi tersebut berasal dari luar wilayah

Bulog subdivre VII Makassar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada Bulog Subdivre VII Makassar tentang pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang manajemen logistik, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang manajemen logistik melalui pengadaan pada Badan Urusan Logistik sub divisi regional VII sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat bahwa proses pengadaan bahan pangan khususnya beras dan komoditi pangan lainnya sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan mengacuh pada tingkat kebutuhan masyarakat dan berdasarkan kebijakan dan program pemerintah untuk memberikan bantuan bahan pokok khususnya beras kepada masyarakat miskin (Raskin) melalui bantuan sosial. Pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik melalui sistem pendistribusian sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat di kemukakan bahwa pelaksanaan pendistribusian kebutuhan pangan khususnya beras dan komoditi pangan lainnya sudah tersedia di pasar-pasar tradisional di mana masyarakat pada umumnya mendapatkan kebutuhan tersebut. Pelaksanaan pendistribusian bahan pangan tersebut dilakukan oleh

Bulog melalui Satker yang dibentuk berdasarkan surat penugasan dan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) baik dalam bentuk Perusahaan maupun dalam bentuk usaha perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk di dalamnya SOP dalam pendistribusian. Pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik melalui sistem pengendalian dan pengawasan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat di kemukakan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan dan pendistribusian akan kebutuhan stok pangan dan komoditi pangan lainnya sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Dewan Asisten Pengawas dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Kemudian dalam melaksanakan program penyediaan stok pangan nasional juga melakukan usaha jasa logistik yaitu dengan membentuk UB. Jastama (Jasa pemberantasan hama), usaha Jasa Prima Logistik yang bergerak dibidang pengangkutan barang antar daerah dan antar propinsi serta usaha penjualan barang-barang komersial lainnya.

2. Dalam pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang manajemen logistik pada Subdivre VII Makasar ada beberapa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu tersedianya sumber daya pegawai dan tersedianya pergudangan yang refresentatif digunakan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah

keadaan cuaca yang sering kali susah diprediksi akan perubahannya serta Keterbatasan stok untuk komoditas tertentu.

B. Saran

Berikut ini akan dikemukakan saran dan masukan untuk pengembangan Bulog Subdivre Makassar terutama dalam pelaksanaan fungsi Badan Urusan Logistik dalam bidang manajemen logistik, sebagai berikut:

1. Bulog Subdivre VII Makassar lebih menjamin ketersediaan stok pangan nasional dengan meningkatkan kualitas kerja aparaturnya dalam pengadaan dan pendistribusian serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan program Bulog.
2. Diharapkan kepada Bulog Subdivre VII Makassar untuk tetap melakukan pengawasan dan pemantauan dengan melakukan sidak setiap saat agar dapat menjamin ketersediaan stok pangan dalam wilayah kerja Bulog dan secara nasional demi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat.
3. Diharapkan kepada Bulog Subdivre VII Makassar untuk menambah Mitra Kerja Pengadaan (MKP) setiap daerah agar stok persediaan dalam wilayah kerja Bulog dapat terpenuhi.
4. Bulog Subdivre VII Makassar diharapkan untuk menyiapkan lahan pengeringan yang cukup yang berada disekitar pergudangan agar

dapat dengan mudah mengantisipasi keadaan cuaca yang sewaktu-waktu dapat berubah.

5. Bulog Subdivre VII Makassar melakukan usaha-usaha penyediaan bahan pokok yang stok persediaanya sangat terbatas dengan melakukan kerjasama antar lembaga dan atau perusahaan penyedia agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin.2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Assauri, Sofjan. 2004. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budihardjo Hardjowiyono and Hayie Muhammad, 2008. *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara.
- Bernadine R. Wijaya. 2011. *Politik Hukum*, Konstitusi Press: Jakarta
- Christoper & Schooner, 2007. Incrementalism Eroding the impediment to a Global Public Procurement Market. *Journal International Law*.
- Didik J.Rachbini,1992, *Peranan Ekonomi Negara Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta
- Harian Tribun Timur.com, Bulog : harga beras naik, makassar, 14 september 2018.
- Handayaningrat Soewarno, 2015. *pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*, Bogor. CV. Haji Masagung.
- Handoko, T Hani. 2009. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: BFE. Edisi Cetakan ke 2.
- Himateta, 2010. Paper Bangunan Bulog (Diakses dari himateta.lk.ipb.ac.id/2010/12/paper-bangunan-bulog/, 11 November 2013).
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah Non Departemen. Jakarta.
- Manullang. 2014. *Manajemen Personalia*. Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- Maryoto, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Adaya Manusia*, Yogyakarta. BPFU Universitas Gadjah Mada.
- Nugroho, D. Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong Harbani. 2011. Hinggis. *Dalam Demokrasi Konstitusional*, Jakarta.

- Robbins, P Stephen & Mary Coulter. 2005. *Manajemen*: Penerbit Perpustakaan Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung; Alfabeta
- Soekartawi. 2002. *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-hasil pertanian : Teori dan Aplikasinya*, Jakarta. Rajawali Press
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Masalah Ketahanan Pangan* , Kompas. Opini, Rabu. 16 Januari Halaman 6.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Tentang Pangan, Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan. Jakarta.
- Peraturan Presiden RI. Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum Bulog, Jakarta.
- Prisma – Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi ,LP3ES Website:
- Mustafa Abu Bakar,2008. Kebijakan Pangan,Peran Perum Bulog, dan kesejahteraan Petani (Diakses dari http://www.setneg.go.id//index.php?option=com_content&task=view&id=1662 ,11 November 2013)
- Kangmas, 2012. Konsep swasembada pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan (Diakses dari <http://dhkangmas.wordpress.com/2012/06/02/konsep-swasembada-pangankemandirian-pangan-kedaulatan-pangan-dan-ketahanan-pangan/>, 3 Maret2014)
- Kamus: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, cetakan ke 16, Pusat Bahasa, Jakarta,hlm 425.
- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996.

Weele, Arjan J Van (2010). *Purchasing and supply Chain Management: Analisis, Strategy, Planning and Practice*. Cengage Learning EMEA. Thomas Rennie Publisher, United Kingdom.





RIWAYAT HIDUP



Samsidar, lahir di Bulu pada tanggal 07 Juli 1997. Anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Sitana dan Ibunda Sampe. Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2003 di SDN 11 Rante Tonggo Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 7 Alla dan tamat pada tahun 2013. Dengan semangat yang tinggi penulis kemudian melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada SMK Negeri 1 Enrekang dengan mengambil konsentrasi Jurusan Administrasi Perkantoran mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dengan system one day service dan diterima di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Strata Satu (S1).

Semasa penulis mengikuti proses perkuliahan juga aktif di berbagai organisasi, antara lain : Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Himpunan Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) Komisariat Unismuh Makassar. Aktif di HMJ Humaniera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Atas usaha keras dan Ridho Allah SWT, pada tahun 2019 penulis mengakhiri masa studi dengan mengambil judul Skripsi “ **Pelaksanaan Fungsi Badan Urusan Logistik dalam Bidang Manajemen Logistik pada BULOG Subdivre VII Makassar.**”